



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta izin-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2024 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Tuban yaitu *'Membangun Serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan Melalui "Mbangun Deso Noto Kutho"'*. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progress pembangunan Tuban yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dasar Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tuban Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tuban tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tuban, **10** Maret 2025

An. BUPATI TUBAN

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. PUDI WIYANA, MSi

Pembina Utama Madya

NIP.19671005 199202 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupatenTuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 tertuang sasaran strategis Kabupaten Tuban berjumlah 14 (empat belas) sasaran dengan indikator kinerja sasaran berjumlah 25 (dua puluh lima) indikator kinerja. Maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

☐ Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja :

Capaian kinerja indikator tujuan sebesar 104,44% (Memuaskan) dan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 105,04% dengan kategori capaian memuaskan.

☐ Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja :

Rata-rata capaian kinerja indikator tujuan sebesar 87,90% (Sangat baik) dan Rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 97,74% dengan kategori capaian memuaskan.

☐ Misi III terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 5 indikator kinerja :

Rata-rata capaian kinerja indikator tujuan sebesar 101,36% (Memuaskan) dan Rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 101,20% dengan kategori capaian memuaskan.

☐ Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja :

Capaian kinerja indikator tujuan sebesar 115,55% (Memuaskan) dan Rata-rata capaian 7 indikator sasaran sebesar 100,22% dengan kategori capaian sangat baik, dan 2 indikator sasaran belum rilis.

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Daerah	2
1.3 Bidang Kewenangan.....	15
1.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	16
1.5 Jumlah Pegawai/ Personil.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis.....	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	27
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	33
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	38
2.5 Perjanjian Kinerja	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	50
BAB IV PENUTUP.....	155

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kab. Tuban.....	2
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2024	6
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan dan kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2024	7
Tabel 1.4 Persentase Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Di Kab. Tuban Tahun 2024.....	8
Tabel 1.5 Urusan Pemerintahan Kab. Tuban.....	15
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Tuban Tahun 2024	18
Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Tuban Tahun 2024	18
Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Tuban.....	24
Tabel 2.2 Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kab. Tuban Tahun 2016-2021	29
Tabel 2.3 Tema Pembangunan dalam Kurun Waktu 5 (lima) Tahun	32
Tema 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kab. Tuban	33
Tabel 2.5 Program dan Anggaran Kab. Tuban Tahun 2024	42
Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Indeks Layak/Nyaman Tinggal (liveability) dengan Target Kinerja tahun 2024	58
Tabel 3.1 Formulasi Perhitungan Kinerja Utama/Sasaran Strategis	50
Tabel 3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Kab. Tuban Tahun 2024	55
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indeks Layak/Nyaman Tinggal (liveability) dan Target Tahun 2024.....	58
Tabel 3.4 Rekapitulasi nilai Indeks Livability Kab. Tuban	61
Tabel 3.5 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	89

Tabel 3.6	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	69
Tabel 3.7	Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Berdasarkan Perhitungan Kategori Responden	72
Tabel 3.8	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2024.....	78
Tabel 3.9	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi.....	83
Tabel 3.10	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi	88
Tabel 3.11	Perbandingan TPT Kab. Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi	93
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerja Utama Tahun 2024.....	94
Tabel 3.13	Perbandingan Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional	107
Tabel 3.14	Perbandingan Indeks desa Membangun Kab. Tuban Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional	110
Tabel 3.15	Perbandingan Peningkatan Nilai Investasi Kab. Tuban Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional	115
Tabel 3.16	Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Tuban dengan sekitar, Provinsi dan Nasional	123
Tabel 3.17	Perbandingan nilai SAKIP Kab. Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi	139
Tabel 3.18	Perbandingan capaian kinerja SPBE Kab. Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi	144
Tabel 3.19	Target dan Capaian Indeks Inovasi Tahun 2024	149
Tabel 3.20	Perbandingan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kab. Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi	130

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 3.1	Perbandingan Indeks Layak/Nyaman Tinggal beberapa tahun terakhir.....	62
Grafik 3.2	Perbandingan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur beberapa tahun terakhir	64
Grafik 3.3	Perbandingan IKLH Kabupaten Tuban beberapa tahun terakhir.....	69
Grafik 3.4	Perbandingan Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban beberapa tahun terakhir.....	74
Grafik 3.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban Dengan target kinerja tahun 2024	76
Grafik 3.6	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban beberapa tahun terakhir	77
Grafik 3.7	Perbandingan Tingkat Kemiskinan beberapa tahun terakhir.....	82
Grafik 3.8	Perbandingan Gini Ratio beberapa tahun terakhir.....	87
Grafik 3.9	Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024.....	93
Grafik 3.10	Perbandingan Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2024 dengan target kinerja	97
Grafik 3.11	Perbandingan Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan beberapa tahun terakhir.....	87
Grafik 3.12	Perbandingan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kab. Tuban beberapa tahun terakhir.....	100
Grafik 3.13	Perbandingan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum beberapa tahun terakhir.....	103
Grafik 3.14	Perbandingan Tingkat Inflasi Daerah Kab. Tuban beberapa tahun terakhir.....	106
Grafik 3.15	Pebandingan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tuban	

beberapa tahun terakhir.....	109
Grafik 3.16 Perbandingan PDRB Per-kapita Kabupaten Tuban beberapa tahun terakhir.....	112
Grafik 3.17 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional.....	113
Grafik 3.18 Perbandingan Peningkatan Nilai Investasi beberapa tahun terakhir.....	114
Grafik 3.19 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Target Kinerja tahun 2024	118
Grafik 3.20 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beberapa tahun terakhir.....	118
Grafik 3.21 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Provinsi dan Nasional.....	119
Grafik 3.22 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi beberapa tahun terakhir.....	122
Grafik 3.23 Perbandingan Capaian Indeks Kesehatan dengan Target Kinerja tahun 2024	124
Grafik 3.24 Perbandingan Capaian Indeks Kesehatan beberapa tahun terakhir.....	124
Grafik 3.25 Perbandingan Capaian Indeks Kesehatan dengan Provinsi tahun 2020-2024	125
Grafik 3.26 Perbandingan Capaian Indeks Indeks Ketahanan Pangan (IKP) beberapa tahun terakhir.....	131
Grafik 3.27 Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target Kinerja tahun 2024	133
Grafik 3.28 Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi beberapa tahun terakhir.....	133
Grafik 3.29 Perbandingan Capaian Indeks Kemandirian Fiskal beberapa tahun terakhir.....	135
Grafik 3.30 Perbandingan Capaian SAKIP dengan Target Kinerja tahun 2024	138

Grafik 3.31 Perbandingan Capaian SAKIP beberapa tahun terakhir.....	138
Grafik 3.32 Perbandingan Capaian Kearsipan Daerah dengan Target Kinerja tahun 2024	141
Grafik 3.33 Perbandingan Capaian Kearsipan Daerah beberapa tahun terakhir.....	142
Grafik 3.34 Perbandingan Capaian Nilai SPBE beberapa tahun terakhir.....	144
Grafik 3.36 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan Target Kinerja tahun 2024	146
Grafik 3.37 Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah dengan Target Kinerja tahun 2024	149
Grafik 3.38 Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah beberapa tahun terakhir.....	150
Grafik 3.39 Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik dengan Target Kinerja tahun 2024	152
Grafik 3.40 Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik beberapa tahun terakhir.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/ kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tuban merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada di sebelah barat laut dan berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah, secara astronomi terletak pada posisi 111°30' - 112°35' Bujur Timur dan 6°40' - 7°18' Lintang Selatan, dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur berjarak 103 Km dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro

Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.562 Ha yang secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 904 Dusun, 1.752 Rukun Warga dan 6.740 Rukun Tetangga. Panjang pantai 65 km membentang dari arah timur Kecamatan Palang sampai barat Kecamatan Bancar, Sedangkan luas wilayah lautan yang dimiliki Kabupaten Tuban adalah 22.608 Km².

Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban

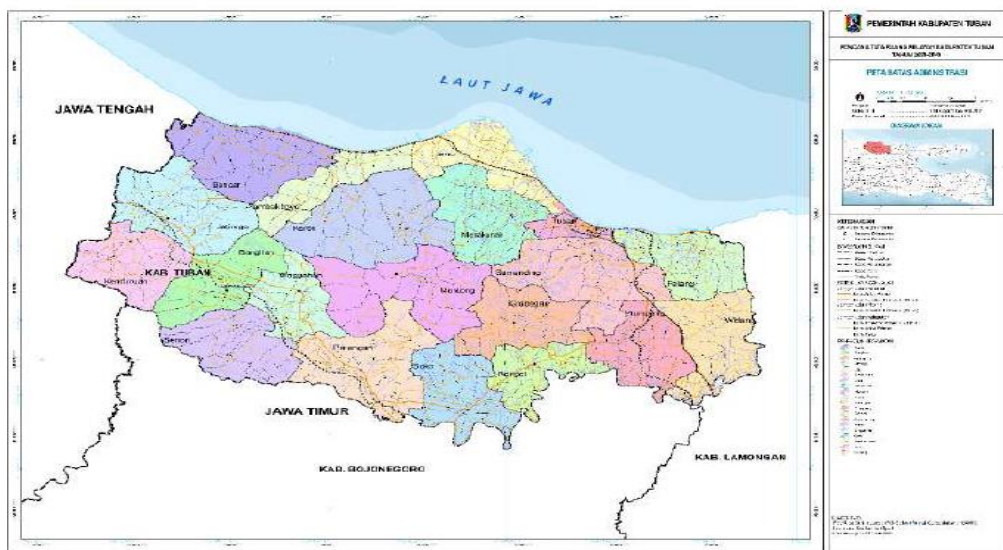
No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kenduruan	85,73	9	-	27	45	190
2	Bangilan	77,27	14	-	46	110	308
3	Senori	78,39	12	-	31	70	242
4	Singgahan	79,05	12	-	36	52	159
5	Montong	147,98	13	-	48	71	257
6	Parengan	114,45	18	-	53	67	277
7	Soko	96,88	23	-	57	113	603

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
8	Rengel	58,52	16	-	41	75	378
9	Grabagan	73,79	11	-	36	46	231
10	Plumpang	86,52	18	-	53	121	502
11	Widang	107,14	16	-	46	65	341
12	Palang	72,70	18	1	52	107	451
13	Semanding	120,99	15	2	48	156	447
14	Tuban	21,29	3	14	7	26	105
15	Jenu	81,61	17	-	47	72	226
16	Merakurak	103,77	19	-	48	100	381
17	Kerek	136,55	17	-	46	77	348
18	Tambakboyo	72,97	18	-	39	59	215
19	Jatirogo	111,98	18	-	52	103	362
20	Bancar	112,36	24	-	67	82	289
JUMLAH		1.839,94	311	17	880	1.617	6.292

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2024

Adapun wilayah Administratif Kabupaten Tuban sebagaimana berikut:

Gambar 1.2.1 Peta Administrasi Kabupaten Tuban



2. Geologi

Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limestone Facies, Pleistocene Limestone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Pliocene Sedimentary Facies. Jenis

Berdasarkan urutan stratigrafinya satuan formasi batuan yang dijumpai adalah anggota napal, formasi kujung, anggota batulempung, formasi kujung, batugamping prupuh, anggota formasi kujung, anggota tawun formasi Tuban, Formasi Tuban, Anggota Ngrayong Formasi Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial.

Adapun kondisi geologi Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta geologi Kabupaten Tuban dibawah ini:

[illegible]

- Alluvial : jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Tuban, Jenu, Merakurak, Tambakboyo dan Bancar. dan Kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah Alluvial adalah Kecamatan Kenduruan. Jatirogo, Bangilan, Senori, Singgahan, Kerek, Montong, dan Grabagan.
- Regosol : jenis tanah Regosol Kabupaten Tuban mempunyai luas 35.629,942 Ha. Yang tersebar di 15 kecamatan terdiri dari Kecamatan Bancar,

Tambakboyo, dan Jenu. Kecamatan yang tidak memiliki jenis tanah ini adalah Kecamatan Grabagan, Widang, Tuban, Merakurak, Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, Kerek, dan Jatirogo.

- Grumosol : jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai luas 33.524,184 Ha yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Jenu, Tambakboyo, Jatirogo, Bancar, Montong, Palang, Semanding, Kerek, dan Grabagan. Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah ini adalah Tuban dan Merakurak.
- Komplek Mediteran Litosol : jenis tanah ini tersebar di Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Grabagan, Palang, Kerek, Merakurak, Jenu, Tambakboyo, Bancar, dan Jatirogo dengan luas 19.358,563 Ha.
- Komplek Mediteran Litosol/Renzina : dari total luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang, Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar.

3. Topografi

Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 5-182 meter diatas permukaan laut (dpl). Bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0–15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0–25 m terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Kabupaten Tuban memiliki wilayah seluas 24.447,49 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.839,95 km² dan wilayah lautan seluas 22.608 km², dengan kawasan pantai sepanjang 65 Km yang membentang dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar. Wilayah Kabupaten Tuban merupakan wilayah dataran dan pegunungan, wilayah ini merupakan wilayah yang

paling luas dengan kondisi yang berbeda. Dari luas daerah menurut jenis lahan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari lahan kering (dry land) seluas 174.298,06 Ha dan lahan cukup basah (wetland) seluas 9.696,51 Ha

Di bagian Utara merupakan kawasan pantai yang relatif kurang subur untuk pertanian sehingga diarahkan untuk kawasan industri dan perikanan. Di bagian tengah merupakan kawasan gugusan pegunungan kapur yang mempunyai kandungan bahan tambang galian golongan C yang cukup potensial, diantaranya: pasir silica, clay, ball clay, phospat, dolomit dan trass serta golongan A berupa Minyak Bumi. Sedangkan bagian selatan merupakan lahan pertanian yang subur penghasil padi yang potensial bagi Kabupaten Tuban, dan bagian Tenggara merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo.

Wilayah Kabupaten Tuban dialiri sebanyak 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah (areal irigasi) seluas 13.881 Ha. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Sungai Bengawan Solo sepanjang 60 km yang mampu mengairi areal irigasi seluas 5.430 Ha, Sungai Kening sepanjang 60 km mampu mengairi areal irigasi seluas 2.522 Ha, dan sungai Guwo Terus sepanjang 7,5 km mampu mengairi areal irigasi seluas 1.250 Ha.

4. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dikaitkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Berikut penjabaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2024:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0–4	38.470	37.074	75.544
2	5–9	42.746	40.700	83.446

3	10-14	42.834	39.962	82.796
4	15-19	41.242	39.032	80.274
5	20-24	44.756	42.687	87.443
6	25-29	46.657	45.601	92.258
7	30-34	48.890	47.267	96.157
8	35-39	47.170	45.876	93.046
9	40-44	47.311	47.012	94.323
10	45-49	44.095	44.426	88.521
11	50-54	40.865	41.953	82.818
12	55-59	37.339	39.210	76.549
13	60-64	31.712	34.000	65.712
14	65-69	23.639	24.793	48.432
15	70-74	14.318	16.263	30.581
16	75+	11.831	19.812	31.643
JUMLAH		630.258	628.110	1.258.368

Sumber : BPS, Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban dari hasil sensus penduduk pada Tahun 2024 sejumlah 1.258.368 jiwa yang terdiri dari 603.875 jiwa penduduk laki-laki dan 605.668 jiwa penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Tuban dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Tuban di dominasi oleh penduduk usia dewasa, yakni mengelompokkan pada usia 30-34 tahun. Jika diamati, penduduk berusia 25-44 tahun lebih besar dibandingkan dengan umur penduduk lainnya. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Tuban Tahun 2021-2024 sebesar 0,48%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban mencapai 657 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 (empat) orang. Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2023-2024, dan kepadatan penduduk per km dapat dilihat pada rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kab.Tuban Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%)
1	Kenduruan	28.643	0,53
2	Bangilan	48.805	0,78
3	Senori	42.158	0,60
4	Singgahan	41.616	0,33
5	Montong	53.543	0,19
6	Parengan	53.804	0,19

7	Soko	84,525	0,42
8	Rengel	59.660	0,30
9	Grabagan	39.420	0,48
10	Plumpang	78.632	0,31
11	Widang	48.797	0,07
12	Palang	88.456	0,98
13	Semanding	116.347	0,96
14	Tuban	84.722	0,11
15	Jenu	56.215	0,76
16	Merakurak	59.464	0,58
17	Kerek	67.439	0,21
18	Tambakboyo	42.710	0,68
19	Jatirogo	55.914	0,34
20	Bancar	58.673	0,37
TUBAN		1.258.368	0,48

Sumber: BPS Kab. Tuban, 2024

Tabel 1.4 Persentase Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2024

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per (km ²)
1	Kenduruan	2,37%	334
2	Bangilan	4,03%	632
3	Senori	3,49%	538
4	Singgahan	3,44%	526
5	Montong	4,43%	362
6	Parengan	4,45%	470
7	Soko	6,99%	872
8	Rengel	4,93%	1.019
9	Grabagan	3,26%	534
10	Plumpang	6,50%	909
11	Widang	4,03%	455
12	Palang	7,31%	1.217
13	Semanding	9,62%	962
14	Tuban	7,00%	3.979
15	Jenu	4,65%	689
16	Merakurak	4,92%	573
17	Kerek	5,58%	494
18	Tambakboyo	3,53%	585
19	Jatirogo	4,62%	499
20	Bancar	4,85%	522
TUBAN		100,00	657

Sumber: BPS Kab. Tuban, 2024

5. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Potensi Pertanian

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa.

Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainnya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

B. Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur *Metharizium*, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

C. Potensi Perikanan dan Kelautan

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu : ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya: (1) Pengembangan Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Lingkungan Pesisir; (3) Pengembangan Perikanan Budidaya; (4) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat; (5) Pengembangan Perbenihan Ikan; dan (6) Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

D. Potensi Peternakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelor, ayam pedaging, itik dan entog.

E. Potensi Kehutanan

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan.

Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan

Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.

F. Potensi Pertambangan

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT. Semen Gresik dan PT. Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya :

- a. Batu Gamping (CaCO_3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain;
- b. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo;
- c. Batu lempung/lempung, batu lempung/ lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain;
- d. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen sorat. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel;
- e. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca,

semen, piring dan industri kimia lainnya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyoy;

- f. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang;

Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi.

G. Potensi Pariwisata

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar di beberapa kecamatan.

1. Obyek Wisata Alam terdiri dari:

- a. Pantai Boom di Kecamatan Tuban;
- b. Pantai Sowan di Kecamatan Bancar;
- c. Pantai Kelapa di Kecamatan Palang;
- d. Goa Akbar di Kecamatan Tuban;
- e. Goa Suci di Kecamatan Palang;
- f. Goa Ngerong di Kecamatan Rengel;
- g. Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong;
- h. Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan;
- i. Air Terjun Ngilirip;
- j. Sendang Maibit;
- k. Pemandian Nganget;
- l. Banyulangse;
- m. Taman Joko Tarup.

2. Obyek wisata Budaya terdiri dari:

- a. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban;
 - b. Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang;
 - c. Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban;
 - d. Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban;
 - e. Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding;
 - f. Kampung Batik Desa Margorejo Kecamatan Kerek.
3. Obyek wisata buatan terdiri dari :
- a. Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding;
 - b. Taman Rekreasi pantai Sowon di Kecamatan Bancar;
 - c. Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih;
 - d. Kampung Air di Kecamatan Merakurak;
 - e. Sendang Asmoro di Kecamatan Semanding;
 - f. Tuban Mangrove Center di Kecamatan Jenu;
 - g. Jatiwangi Park di Kecamatan Merakurak;
 - h. Tebing Pelangi di Kecamatan Merakurak;
 - i. Agro Park Klumpit di Kecamatan Soko.

H. Potensi Industri

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat terciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainnya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ± 12.832 Ha yang terdiri dari:

- 1. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.

2. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rengel, Jatirogo, dan Palang.
3. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

I. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Faktor rawan bencana di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh proses geologi berupa tektonik, hidrogeologi, sedimentasi dan klimatologi yang dapat menghasilkan produk kebencanaan antara lain banjir, abrasi, gerakan tanah/longsor, kekeringan dan angin puting beliung sedangkan dari faktor aktifitas manusia dampaknya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan pembangunan seperti banjir bandang, kebakaran hutan, kebakaran permukiman dan kegagalan industri. Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Tuban yaitu: Kawasan sempadan sungai yang rawan banjir, dan daerah pantai yang rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. Di wilayah Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana.

1. Kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir:

- Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko merupakan daerah aliran Sungai Bengawan Solo, sehingga tiap musim hujan Kecamatan ini rawan akan bencana banjir besar.
- Afvoor Macanan dan Afvoor Sekardadi : Kecamatan Jenu dan Merakurak
- Kecamatan yang terkena dampak luapan sungai Kening adalah Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, dan Parengan.

2. Kecamatan yang merupakan daerah rawan abrasi pantai yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.

3. Kecamatan yang merupakan daerah rawan gelombang pasang yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.

1.2. Bidang Kewenangan

Urusan Pemerintahan Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terdiri atas Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan serta Urusan Penunjang. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Tabel 1.5

Urusan Pemerintahan Kabupaten Tuban

No	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1.	Pendidikan	1.	Tenaga Kerja
2.	Kesehatan	2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.	Pangan
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.	Pertanahan
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.	Lingkungan Hidup
6.	Sosial	6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		9.	Perhubungan
		10.	Komunikasi dan Informatika
		11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12.	Penanaman Modal
		13.	Kepemudaan dan Olahraga
		14.	Statistik
		15.	Persandian
		16.	Kebudayaan
		17.	Perpustakaan
		18.	Kearsipan
	Urusan Pilihan		Urusan Penunjang

No	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	No	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1.	Kelautan dan Perikanan	1.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2.	Pariwisata	2.	Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.	Pertanian	3.	Penataan kelembagaan daerah
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	4.	Perencanaan pembangunan daerah
5.	Perdagangan	5.	Pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
6.	Perindustrian	6.	Peningkatan sarana prasarana bidang hukum
7.	Transmigrasi	7.	Peningkatan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
		8.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah
		9.	Pengawasan

Sumber : Data Diolah

1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kelembagaan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dibentuk dengan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam tahun 2024 struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

- a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Bagian Hukum

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

- a. Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan.
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

3) Asisten Administrasi Umum

- a. Bagian Umum
- b. Bagian Organisasi

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Daerah terdiri dari:
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
 - Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5. Badan Daerah terdiri dari
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah
 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - RSUD Dr.R.Koesma
 - RSUD ALI MANSHUR
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kecamatan sebanyak 20 dan Kelurahan sebanyak 17 terdiri dari Kecamatan : Kecamatan Tuban, Semanding, Jenu, Merakurak, Palang, Widang, Plumpang, Rengel, Grabagan, Montong, Kerek, Soko, Parengan, Singgahan, Tambakboyo, Bancar, Senori, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan.

1.5. Jumlah Pegawai / Personil

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat adalah personil/pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Pada Tahun 2024, pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tercatat sejumlah 10.092 orang, yang terdiri dari 6.036 orang PNSD dan PPPK sebanyak 4056 orang. Adapun data Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I/b	-
2	I/c	3
3	I/d	25
4	II/a	52
5	II/b	102
6	II/c	226
7	II/d	622
8	III/a	815
9	III/b	1434
10	III/c	400
11	III/d	996
12	IV/a	359
13	IV/b	865
14	IV/c	134
15	IV/d	3
	Total	6036

Sumber : BKPSDM Kabupaten Tuban, 2024

Tabel 1.7 Jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 berdasarkan Golongan

No	Kelas	Jumlah
1	5	64
2	7	500
3	9	3305
4	10	182
5	11	5
	Total	4056

Sumber : BKPSDM Kabupaten Tuban, 2024

1.4 Permasalahan utama yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tuban

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tuban saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi kedepan perlu mendapat perhatian. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Angka kemiskinan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Pengangguran yang cukup tinggi;
3. Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia (SDM);
4. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi;
5. Infrastruktur yang ada belum optimal;
6. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal;
7. Kualitas lingkungan yang belum membaik;
8. Kapasitas Fiskal Daerah Yang Terbatas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Renstra perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan dijabarkan dalam siklus rencana tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pada setiap Tahun Anggaran.

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.

2.1.1 Visi

Perumusan Visi Kabupaten Tuban didasarkan pada permasalahan utama yang dihadapi, dari masalah-masalah utama diambil inti kalimat dan dirumuskannya visi Kabupaten Tuban. Rumusan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah: ***“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”***

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Sejahtera, suatu konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau berkurangnya masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara materiil maupun non materiil.
2. Berkeadilan, adalah Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (citizenship) baik hak politik, ekonomi, maupun sosial.
3. Berbudaya, suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama.
4. Berdaya saing, Suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan.
5. Berbasis lingkungan, suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai

prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2021-2026 yaitu :

- Misi 1 “Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal”
- Misi 2 “Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”
- Misi 3 “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih”
- Misi 4 “Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif”

2.1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan faktualisasi isu-isu strategis Kabupaten Tuban secara empiris, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tuban 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tuban 2021-2026 memiliki 5 tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dalam Misi 1:

Tujuan 1 : “Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi (T1)

2. Tujuan dalam Misi 2:

Tujuan 2 : “Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2)

3. Tujuan dalam Misi 3:

Tujuan 3 : “Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender” (T3)”

4. Tujuan dalam Misi 4:

Tujuan 4 : “Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik (T4)”

2.2.4 Sasaran

Sasaran RPJMD menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tuban

VISI : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan
MISI 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal

TUJUAN			SASARAN	
No	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
1	Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi	1. Indeks Layak Nyaman Tinggal (<i>Liveability Index</i>)	1 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 3 Berkurangnya resiko bencana 4 Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	1. Indeks Kualitas layanan infrastruktur 2. Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) 3. Indeks Resiko Bencana 4. Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup
MISI 2 : Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif				
2.	Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Tingkat Kemiskinan 3. Gini Ratio 4. Indeks Williamson 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, Perindustrian, perdagangan 2 Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis	1. PDRB sektor pertanian, kehutanan dan peternakan 2. PDRB sektor industry 3. pengolahan PDRB Penyediaan akomodasi dan mamin 1. Tingkat Inflasi Daerah 2. Indeks Desa Membangun(IDM) 3. PDRB Per Kapita

TUJUAN			SASARAN	
No	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
	ekonomi kerakyatan		kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM, BUMDes	
			3 Meningkatnya . nilai investasi daerah	1. Persentase peningkatan nilai investasi
MISI 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih				
3.	Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1 Meningkatkan . kualitas Pendidikan dan minat baca masyarakat	1. Indeks Literasi 2. Indeks Pendidikan
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	2 Meningkatnya . derajat kualitas Kesehatan masyarakat	1. Indeks Kesehatan
			3 Terjaminnya . ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	1. Indeks Ketahanan pangan
			4 Meningkatnya . kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
MISI 4: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif				
4.	Mewujudkan pemerintahan yang berdaya	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1 Birokrasi yang . bersih dan akuntabel	1. Indeks Kemandirian fiskal pemerintah daerah

TUJUAN			SASARAN	
No	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
	guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik			Indeks Pengelolaan keuangan daerah (IPKD) Indeks Kapasitas fiskal 3. Nilai SAKIP Daerah 4.
			2 Birokrasi yang . kapabel	1. Indeks Kearsiapan Indeks SPBE 2. Indeks Inovasi 3. Indeks Profesionalitas 4. ASDN
			3 Terwujudnya . kualitas pelayanan publik yang prima	1. Indeks pelayanan publik

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

2.2.1. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 tersebut dilakukan analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan dirumuskannya 9 (Sembilan) strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan;
2. Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum atas dampak lingkungan;

3. Pembangunan wilayah berbasis potensi dan manajemen resiko lingkungan dan bencana;
4. Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi beragama;
5. Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian (secara luas), Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian;
6. Meningkatkan daya tarik dan kualitas struktur investasi;
7. Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan;
8. Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal, berbasis sasaran pembangunan daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan. Berdasarkan strategi yang sudah disusun diatas, berikut arah kebijakan untuk masing-masing sasaran dan strategi:

Tabel 2.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan	1 Pemenuhan layanan infrastruktur dasar pemukiman layak huni
			2 Penyediaan infrastruktur daya dukung perekonomian
			3 Pembangunan Infrastruktur pencegah dan perlindungan terhadap bencana
			4 Pembangunan Infrastruktur Akses keterhubungan desa dan kota antar wilayah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum lingkungan	1 Peningkatan fungsi dan kapasitas konservasi untuk pemulihan lingkungan
			2 Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penegakkan hukum lingkungan
3	Berkurangnya resiko bencana	Pembangunan wilayah berbasis potensi, manajemen resiko dan kapasitas penanggulangan bencana	1 Penguatan kapasitas mitigasi bencana
			2 Perencanaan dan pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan
			3 Pengendalian, penertiban, dan penegakkan hukum lingkungan
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi agama	1 Pemajuan dan aktualisasi nilai-nilai budaya dan pengamalan nilai-nilai agama
			2 Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor	Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil	1 Perlindungan hulu hilir pelaku ekonomi primer dan penguatan faktor produksi
			2 Pengendalian Alih Fungsi Lahan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	pertanian secara luas, Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian	3 Reformasi tata kelola usaha ekonomi untuk Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan mencakup Peningkatan jaringan kerjasama usaha ekonomi unggulan, Penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi modern
			4 Industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata
			5 Pembangunan sarana prasarana pertanian (secara luas)
6	Meningkatnya Nilai Investasi daerah	Meningkatkan daya tarik dan iklim investasi	1 Pemetaan Potensi (sektoral) dan kebutuhan Investasi
			2 Promosi dan penciptaan iklim investasi
			3 Peningkatan layanan investasi
7	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM, dan Bumdes	Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan	1 Relasi sinergis pertumbuhan wilayah ekonomi dan Pemerataan pusat aktivitas perekonomian
			2 Kerjasama ekonomi antar Kecamatan dan Penguatan ekonomi berbasis kawasan perdesaan
			3 Penyediaan kredit dan stimulus usaha
			4 Peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja
			5 Penciptaan lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja
			6 Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penguatan faktor produksi
			7 Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDES

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			8 perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberian subsidi, dan perlindungan upah (Pengurangan beban pengeluaran kelompok rentan dan miskin)
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik	1 Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan
			2 Peningkatan Lama dan Lanjut sekolah dalam penyelenggaraan wajib belajar
			3 Pengembangan inovasi sistem pembelajaran yang efektif berbasis peserta didik masa pandemik
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat		1 Peningkatan pemenuhan standarisasi kuantitas dan kualitas sistem layanan kesehatan
			2 Adaptasi dan pemantapan protokol kesehatan di masa dan pasca pandemik covid 19
			3 Penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar		1 Peningkatan pola pangan harapan
			2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat
			3 Pengurangan kerawanan pangan
			4 Peningkatan Cadangan pangan
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan		1 Penguatan pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan
			2 Peningkatan Perlindungan anak

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	perlindungan anak		
12	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Melaksanakan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal berbasis sasaran pembangunan daerah	1 Penguatan akuntabilitas tata kelola sistem dan proses bisnis pemerintahan
13	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		1 Penataan desain dan struktur organisasi untuk pengembangan kapabilitas kelembagaan 2 Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas ASN
14	meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima		1 Penguatan inovasi layanan publik
15	meningkatkan sistem pengawasan yang efektif		1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Daerah

Tabel 2.3. Tema Pembangunan dalam Kurun Waktu 5 (lima) Tahun

2022	2023	2024	2025	2026
Pengentasan kemiskinan berkelanjutan melalui transformasi struktur ekonomi yang produktif dan berketahanan dengan afirmasi perlindungan sosial	Peningkatan kualitas SDM seutuhnya yang didukung dengan kualitas penyediaan infrastruktur layanan dasar dan penunjang aktivitas perekonomian	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berketahanan dan berdaya saing	Pemantapan perwujudan daya saing daerah berbasis potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang unggul	Perwujudan Tuban sejahtera berbasis pemenuhan rasa keadilan yang berkekuatan budaya, berdaya saing untuk kehidupan yang berkelanjutan

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU/*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026 secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan tersebut, ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, maupun dalam evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
1	Meningkatnya kualitas Layanan Infrastruktur	1 Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
			maupun Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu
3	Berkurangnya resiko bencana	3 Indeks Resiko Bencana	Tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota, sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard)
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4 Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup	Indeks dibentuk dari toleransi, kesetaraan dan kerjasama, merepresentasikan dimensi saling menerima menghormati/ menghargai perbedaan, kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedapkan superioritas
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata,	5 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
	perindustrian, perdagangan		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		6 PDRB Sektor Industri Pengolahan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu Sektor Industri Pengolahan
		7 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
6	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8 Tingkat Inflasi Daerah	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga
		9 Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan
		10 PDRB Perkapita	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu
7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11 Persentase peningkatan nilai investasi	<i>(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota/ (jumlah investasi tahun</i>

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
			$n-1$ di kabupaten/kota) $\times 100\%$
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12 Indeks Pendidikan	Indeks yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
		13 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks yang menggambarkan tingkat literasi suatu daerah
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14 Indeks Kesehatan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir/ derajat Kesehatan suatu masyarakat
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15 Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah, Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17 Indeks Kemandirian Fiskal	Indikator untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
		Pemerintah Daerah	kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat
		18 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah
		19 Indeks Kapasitas Fiskal	Kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu
		20 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Daerah dari Kemenpan RI
13	Birokrasi yang kapabel	21 Indeks Kearsipan Daerah	Hasil penilaian terhadap Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
		22 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain
		23 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
			melakukan tugas jabatannya
		24 Indeks Inovasi	Himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima	25 Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Professional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana Prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah

2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tuban yang disusun sesuai kesepakatan bersama antar komponen daerah dengan menggunakan ukuran yang merepresentasikan rencana keberhasilan capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Tuban guna mewujudkan Misi dan Visi Kabupaten Tuban.

2.5. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024.

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	1. Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	78,00
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,70
3	Berkurangnya resiko bencana	3. Indeks Resiko Bencana	133
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	90,26
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,45
		6. PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,82
		7. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,43
6	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8. Tingkat Inflasi Daerah	1-2
		9. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7952
		10. PDRB Per Kapita	56.080.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11. Persentase Peningkatan Nilai Investasi	3,5
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12. Indeks Pendidikan	0,60
		13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,3
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14. Indeks Kesehatan	0,805
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15. Indeks Ketahanan Pangan	87,3
11	Meningkatnya Kesenjangan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,5
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,2426
		18. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	76,25
		19. Indeks Kapasitas Fiskal	1,6
		20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	74,24
13	Birokrasi yang Kapabel	21. Indeks Kearsipan Daerah	83,20
		22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7
		23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	62,14
		24. Indeks Inovasi	63
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima	25. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi,	4,50

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Kab. Tuban Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,333,719,815,819	PAPBD/DAK/BLUD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	252,611,973,359	PAPBD/DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	147,231,000	PAPBD
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	330,257,000	PAPBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	65,383,500	PAPBD
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	170,973,141,605	PAPBD/DBHCHT,PAJAK ROKOK/DAK
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,377,534,600	PAPBD/DAK
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	515,245,450	PAPBD/DAK
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,520,106,558	PAPBDDAK
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	107,267,514,509	PAPBD/DAK
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14,013,905,634	PAPBD/DAK
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3,812,940,000	PAPBD/DAK
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9,237,392,400	PAPBD/DAK
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	114,430,592,101	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
15	Program Penataan Bangunan Gedung	6,163,981,000	PAPBD
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	34,042,418,964	PAPBD
17	Program Penyelenggaraan Jalan	447,926,413,949	PAPBD/DAK
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,775,132,460	PAPBD
19	Program Kawasan Permukiman	7,506,958,500	PAPBD/SILPA DAK
20	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	25,000,000	PAPBD
21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	216,394,442,597	PAPBD
22	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9,855,984,214	PAPBD/DBHCHT
23	Program Penanggulangan Bencana	4,108,684,979	PAPBD
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,286,669,370	PAPBD
25	Program Pemberdayaan Sosial	625,338,300	PAPBD
26	Program Rehabilitasi Sosial	8,523,042,476	PAPBD
27	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	16,793,053,007	PAPBD/DBHCHT
28	Program Penanganan Bencana	161,849,000	PAPBD
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	60,431,700	PAPBD
30	Program Perencanaan Tenaga Kerja	114,805,050	PAPBD
31	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,497,418,429	PAPBD/DBHCHT
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	1,612,900,600	PAPBD
33	Program Hubungan Industrial	419,160,500	PAPBD
34	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	196,628,800	PAPBD
35	Program Perlindungan Perempuan	232,459,200	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
36	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	53,351,000	PAPBD
37	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	231,575,100	PAPBD
38	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	155,348,100	PAPBD
39	Program Perlindungan Khusus Anak	111,950,000	PAPBD
40	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	907,021,398	PAPBD
41	Program Penanganan Kerawanan Pangan	137,582,600	PAPBD
42	Program Pengawasan Keamanan Pangan	153,636,350	PAPBD
43	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10,470,000	PAPBD
44	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,052,468,400	PAPBD
45	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	15,134,929,900	PAPBD
46	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	23,850,000	PAPBD
47	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	166,782,050	PAPBD
48	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	852,852,500	PAPBD
49	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	43,336,300	PAPBD
50	Program Pengelolaan Persampahan	18,961,550,040	PAPBD
51	Program Pendaftaran Penduduk	5,060,947,000	PAPBD
52	Program Pencatatan Sipil	196,844,100	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
53	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	878,523,050	PAPBD
54	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	52,725,000	PAPBD
55	Program Penataan Desa	59,910,000	PAPBD
56	Program Peningkatan Kerjasama Desa	200,000,000	PAPBD
57	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8,216,791,550	PAPBD
58	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,309,683,700	PAPBD
59	Program Pengendalian Penduduk	522,846,500	PAPBD/DAK
60	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6,748,959,000	PAPBD/DAK
61	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6,301,100,000	PAPBD/DAK
62	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	112,223,197,831	PAPBD
63	Program Pengelolaan Pelayaran	41,826,000	PAPBD
64	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,212,339,000	PAPBD
65	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5,704,960,838	PAPBD
66	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	65,190,000	PAPBD
67	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	340,501,000	PAPBD dan DAK NON FISIK
68	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	183,724,000	PAPBD
69	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	735,643,750	PAPBD dan DAK NON FISIK
70	Program Pengembangan Umkm	421,149,803	PAPBD
71	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	475,800,000	PAPBD
72	Program Promosi Penanaman Modal	625,400,000	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
73	Program Pelayanan Penanaman Modal	411,018,000	PAPBD
74	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	416,065,250	PAPBD
75	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	172,787,458	PAPBD
76	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,255,565,450	PAPBD
77	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16,687,897,399	PAPBD
78	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2,149,654,700	PAPBD
79	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	396,658,390	PAPBD
80	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	186,405,050	PAPBD
81	Program Pengembangan Kebudayaan	1,587,612,800	PAPBD
82	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	211,750,000	PAPBD
83	Program Pembinaan Sejarah	97,000,000	PAPBD
84	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	83,450,000	PAPBD
85	Program Pengelolaan Permuseuman	984,845,200	PAPBD/DAK
86	Program Pembinaan Perpustakaan	1,310,249,800	PAPBD
87	Program Pengelolaan Arsip	616,561,150	PAPBD
88	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	128,041,600	PAPBD
89	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7,188,244,250	PAPBD/DAK
90	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,415,210,650	PAPBD/DAK
91	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	117,512,700	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
92	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2,450,715,220	PAPBD/DAK
93	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,230,700,000	PAPBD
94	Program Pemasaran Pariwisata	793,425,000	PAPBD
95	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	324,000,000	PAPBD
96	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2,172,240,000	PAPBD
97	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4,547,748,029	PAPBD/DAK/DBHCHT
98	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22,718,461,618	PAPBD/DAK/DBHCHT
99	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,301,027,470	PAPBD/DAK
100	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	570,711,500	PAPBD
101	Program Perizinan Usaha Pertanian	46,800,000	PAPBD
102	Program Penyuluh Pertanian	2,967,917,000	PAPBD/DAK
103	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,899,288,230	PAPBD
104	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	387,199,500	PAPBD
105	Program Pengembangan Ekspor	305,541,000	PAPBD
106	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	305,740,000	PAPBD
107	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	418,429,844	PAPBD
108	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5,077,600,119	PAPBD
109	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	150,212,100	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
110	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	135,317,000	PAPBD
111	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	39,060,553,784	PAPBD
112	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,784,025,576	PAPBD/DBHCHT
113	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	56,610,994,241	PAPBD
114	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4,522,965,750	PAPBD
115	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,862,367,400	PAPBD
116	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	507,272,203,319	PAPBD
117	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,636,905,350	PAPBD
118	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,398,499,225	PAPBD
119	Program Kepegawaian Daerah	5,854,507,900	PAPBD
120	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,487,673,750	PAPBD
121	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,602,797,800	PAPBD
122	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,634,376,750	PAPBD
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,720,695,111	PAPBD
124	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,309,500,920	PAPBD
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15,865,780,687	PAPBD
126	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2,351,985,510	PAPBD
127	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	204,599,600	PAPBD
128	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4,172,077,050	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
129	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	895,913,350	PAPBD
130	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	41,310,101,400	PAPBD
131	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	174,180,000	PAPBD
132	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	464,046,000	PAPBD
	J U M L A H	3,757,336,926,440	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bupati Tuban Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penilaian ini untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Cara pengukuran/ penghitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Formulasi Perhitungan Kinerja Utama/Sasaran Strategis

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
1	Meningkatnya kualitas Layanan Infrastruktur	1 Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi

				lingkungan pada lingkup dan periode tertentu
3	Berkurangnya resiko bencana	3	Indeks Resiko Bencana	Tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota, sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard)
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4	Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup	Indeks dibentuk dari toleransi, kesetaraan dan kerjasama, merepresentasikan dimensi saling menerima menghormati/ menghargai perbedaan, kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedapkan superioritas
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		6	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu Sektor Industri Pengolahan
		7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

6	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8	Tingkat Inflasi Daerah	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga
		9	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan
		10	PDRB Perkapita	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu
7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11	Persentase peningkatan nilai investasi	<i>(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota/ (jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota) X 100%</i>
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12	Indeks Pendidikan	Indeks yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
		13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks yang menggambarkan tingkat literasi suatu daerah
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14	Indeks Kesehatan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir/ derajat Kesehatan suatu masyarakat
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah, Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi

				ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan
11	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	Indikator untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat
		18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah
		19	Indeks Kapasitas Fiskal	Kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu
		20	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Daerah dari Kemenpan RI
13	Birokrasi yang kapabel	21	Indeks Kearsipan Daerah	Hasil penilaian terhadap Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

		22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain
		23	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya
		24	Indeks Inovasi	Himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Professional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana Prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja dan Realisasi Kabupaten Tuban Tahun 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	KET-
I	Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi		a Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)	75,47	78,82	104,44	
		1 Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	1 Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	80	84,35	105,44	
		2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,03	69,74	109,57	
		3 Berkurangnya resiko bencana	3 Indeks Resiko Bencana	127	Belum Rilis		
		4 Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4 Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,03	91,11	100,09	
II	Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan		b Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,43 – 4,86	3,86	87,13	
			c Tingkat Kemiskinan	14	14,36	97,49	
			d Gini Ratio	0,31 – 0,344	0,355	96,90	
			e Indeks Williamson	0,938 – 0,96	Belum Rilis		
			f Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3	4,28	70,09	
		5 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5 PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,45	2,18	132,12	
			6 PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,82	1,83	38,69	
			7 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,43	5,63	82,67	
		6	8 Tingkat Inflasi Daerah	1-2	1,51	100	

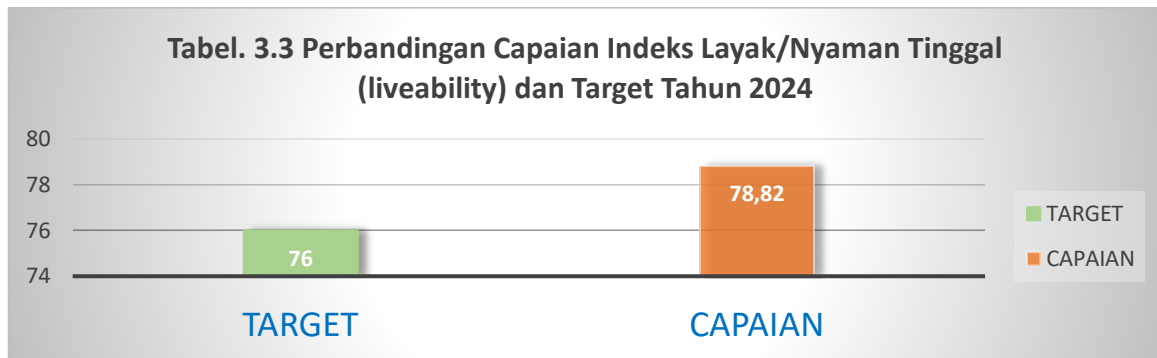
MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	KET-
			Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8001	0,8269	105,22	
				10	PDRB Per kapita	57.180.000	71.098.000	124,34	
		7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11	Persentase peningkatan nilai investasi	3,5	-98	-2800	
III	Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender			g	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,4	72,31	102,71	
				h	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,44	Belum Rilis		
		8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12	Indeks Pendidikan	0,61	Belum Rilis		
				13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,5	11,82	112,57	
		9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14	Indeks Kesehatan	0,81	0,845	104,32	
		10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15	Indeks Ketahanan Pangan	89	85,85	96,46	
		11	Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,98	Belum Rilis		
IV	Mewujudkan pemerintahan			i	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62,01	90,5	145,94	

MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	KET-
	yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,2503	Belum Rilis		
				18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,5	Belum Rilis		
				19	Indeks Kapasitas Fiskal	1,7	1,387	81,59	
				20	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	76,28	80,13	105,05	
		13	Birokrasi yang kapabel	21	Indeks Kearsipan Daerah	78,25	83,55	106,77	
				22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE)	2,9	4,24	146,21	
				23	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	62,36	81,98	127,38	
				24	Indeks Inovasi	65	55,6	85,54	
		14	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	3,88	4,45	114,69	

1. Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)

1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability) jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut :



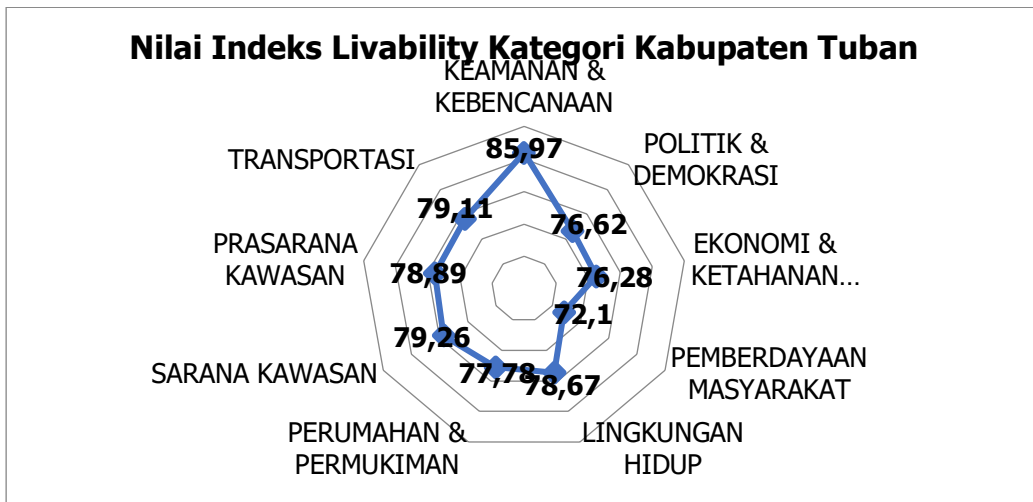
Penilaian Indeks Livability Kabupaten Tuban dilakukan berdasarkan 9 kategori dan 26 sub kategori. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis bahwa nilai Indeks Layak/Nyaman Tinggal atau Indeks Livability Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah 78,82. Nilai Indeks Livability tersebut telah mencapai target nilai indeks livability tahun 2024 pada Dokumen RPJMD sebesar 76.

Penilaian Indeks Livability berdasarkan 9 kategori meliputi: Keamanan dan Kebencanaan, Politik dan Demokrasi, Ekonomi dan Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Sarana Kawasan, Prasarana Kawasan, dan Transportasi. Kategori Keamanan dan Kebencanaan di Kabupaten Tuban mendapatkan nilai Indeks Livability tertinggi atau masyarakat merasa sangat nyaman/puas dengan Keamanan dan Kebencanaan di Kabupaten Tuban. Adapun rincian untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Keamanan dan Kebencanaan (85,97%)
2. Politik dan Demokrasi (76,62%)
3. Ekonomi dan Ketahanan Pangan (76,28%)
4. Pemberdayaan Masyarakat (72,10%)
5. Lingkungan Hidup (78,67%)
6. Perumahan & Permukiman (77,78%)
7. Sarana Kawasan (79,26%)
8. Prasarana Kawasan (78,89%)

9. Transportasi (79,11%)

Nilai Indeks Livability untuk 9 kategori dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar Diagram Nilai Indeks Livability Untuk 9 Kategori Kabupaten Tuban

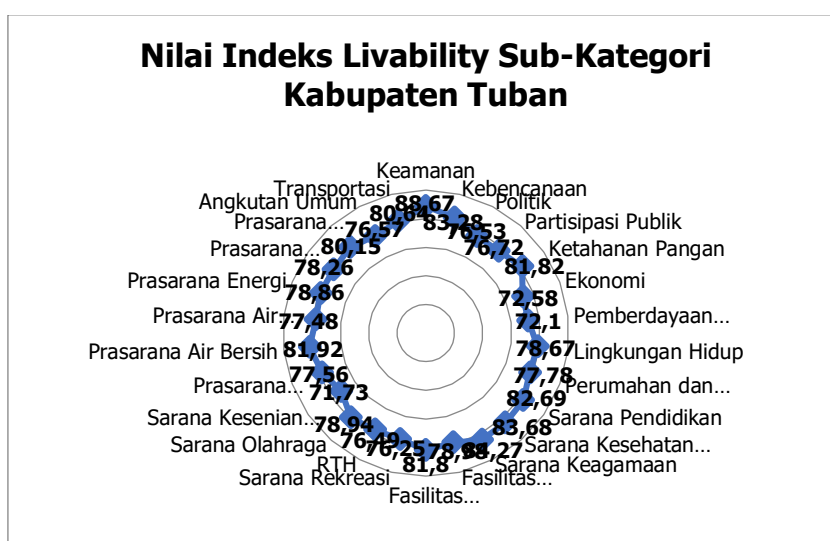
Sumber : Hasil Analisis, 2024

Selain penilaian berdasarkan kategori, penilaian Indeks Livability Kabupaten Tuban juga dilakukan berdasarkan 26 sub kategori meliputi: Keamanan, Kebencanaan, Politik, Partisipasi Publik, Ketahanan Pangan, Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan Masyarakat, Sarana Fasilitas Perdagangan Dan Jasa, Fasilitas Administrasi Dan Pelayanan Publik, Sarana Rekreasi, RTH, Sarana Olahraga, Sarana Kesenian Dan Kebudayaan, Prasarana Kebersihan, Prasarana Air Bersih, Prasarana Air Kotor/ Limbah, Prasarana Energi, Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika, Prasarana Penanganan Banjir, Angkutan Umum dan Transportasi. Adapun nilai Livability Indeks untuk masing-masing sub kategori dijabarkan sebagai berikut:

1. Keamanan (88,67%)
2. Kebencanaan (83,28%)
3. Politik (76,53%)
4. Partisipasi Publik (76,72%)
5. Ketahanan Pangan (81,82%)
6. Ekonomi (72,58%)
7. Pemberdayaan Masyarakat (72,10%)
8. Lingkungan Hidup (78,67%)

9. Perumahan dan Permukiman (77,78%)
10. Sarana Pendidikan (82,69%)
11. Sarana Kesehatan Masyarakat (83,68%)
12. Sarana Keagamaan (84,27%)
13. Sarana Fasilitas Perdagangan Dan Jasa (78,98%)
14. Fasilitas Administrasi Dan Pelayanan Publik (81,8%)
15. Sarana Rekreasi (76,25%)
16. RTH (76,49%)
17. Sarana Olahraga (78,94%)
18. Sarana Kesenian Dan Kebudayaan (71,73%)
19. Prasarana Kebersihan (77,56%)
20. Prasarana Air Bersih (81,92%)
21. Prasarana Air Kotor/ Limbah (77,48%)
22. Prasarana Energi (78,86%)
23. Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika (78,26%)
24. Prasarana Penanganan Banjir (80,15%)
25. Angkutan Umum (76,57%)
26. Transportasi (80,64%)

Nilai Indeks Livability untuk 26 sub-kategori dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar Diagram Nilai Indeks Livability Untuk 26 Sub Kategori Kabupaten Tuban

Sumber : Hasil Analisis, 2024

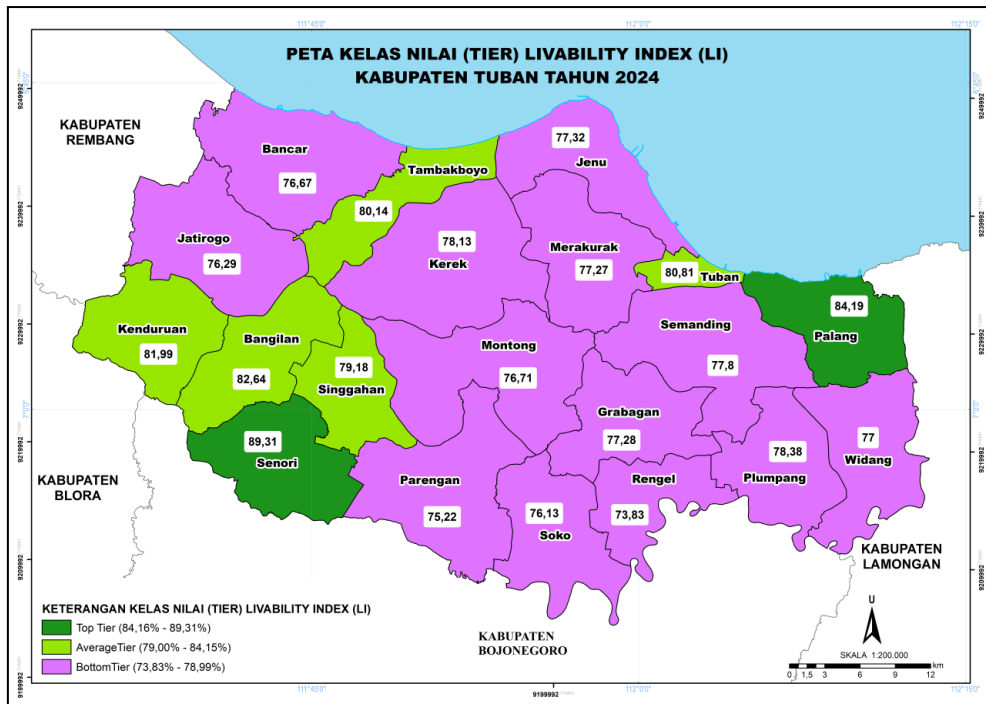
Rekapitulasi nilai Indeks Livability Kabupaten Tuban Tahun 2024 menurut nilai kelas indeks lebih lanjut dapat ditinjau pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.4 Rekapitulasi nilai Indeks Livability Kab. Tuban 2024

No	Kecamatan	Nilai Indeks Kelas LI (Tier)	Keterangan Nilai Indeks Kelas LI (Tier)
1	Senori	89,31	Top Tier
2	Palang	84,19	Top Tier
3	Bangilan	82,64	Average Tier
4	Kenduruan	81,99	Average Tier
5	Tuban	80,81	Average Tier
6	Tambakboyo	80,14	Average Tier
7	Singgahan	79,18	Average Tier
8	Plumpang	78,38	Bottom Tier
9	Kerek	78,13	Bottom Tier
10	Semanding	77,80	Bottom Tier
11	Jenu	77,32	Bottom Tier
12	Grabagan	77,28	Bottom Tier
13	Merakurak	77,27	Bottom Tier
14	Widang	77,00	Bottom Tier
15	Montong	76,71	Bottom Tier
16	Bancar	76,67	Bottom Tier
17	Jatirogo	76,29	Bottom Tier
18	Soko	76,13	Bottom Tier
19	Parengan	75,22	Bottom Tier
20	Rengel	73,83	Bottom Tier

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Senori berada di kelas Top Tier dengan nilai Indeks Livability sebesar 89,31%. Sedangkan Kecamatan Rengel menempati kelas Bottom Tier paling rendah dengan nilai Indeks Livability yaitu 73,83%. Secara spasial Nilai Indeks Livability Agregat dan Nilai Indeks Livability Berdasarkan Kelas/Tier dapat dilihat pada peta berikut ini.

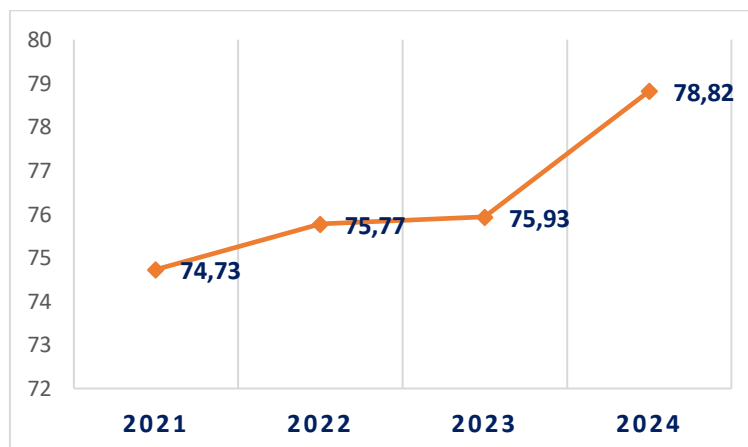


Gambar Peta Kelas Nilai Indeks Livability (Tier) Kabupaten Tuban Tahun 2024

1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Indeks layak/Nayam Tinggal (Liveability) selama beberapa tahun terakhir seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1 Perbandingan Indek Layak/Nyaman Tinggal
(Liveability) beberapa Tahun Terakhir



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Livability Kabupaten Tuban berada pada tren naik mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 angkanya mencapai 74,73 hingga pada tahun 2024 mencapai 78,82.

1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability) target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 76,14, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 78,82 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 103,52%.

1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai Liveability di Kabupaten Tuban dapat dilakukan melalui:

- a. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan skala prioritas dalam hal membangun sarana-prasarana terutama pada kategori LI yang masih rendah, dengan berprinsip pada pembiayaan yang kecil bagi APBD, namun memiliki dampak yang luas bagi masyarakat umum;
- b. Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun aksi pembinaan dan pendampingan kepada desa dalam musyawarah desa dalam menyusun APBDes, agar dapat menyusun program dan kegiatan RPJMDesa yang meningkatkan sarana-prasarana masyarakat pada level desa. contoh penyediaan internet dan air bersih/HIPPAM;
- c. Sektor ketahanan pangan menjadi salah satu faktor penting peningkatan kenyamanan hidup masyarakat Tuban. Kemudahan dan keterjangkauan harga pangan, khususnya beras, dimana Kabupaten Tuban sebagai lumbung padi regional dan nasional, perlu diprioritaskan dengan membenahi tata niaga beras dari hulu hingga hilir;
- d. Pengoptimalan koordinasi antar pemangku kepentingan lintas sektor terkait peningkatan aspek maupun kategori LI yang menjadi kewenangan, mulai dari tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat;

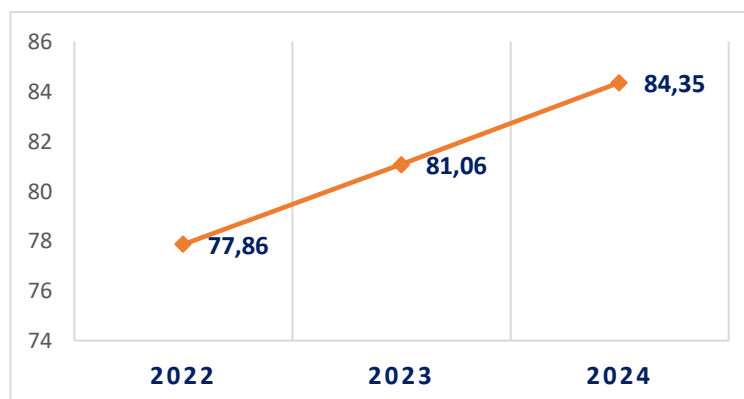
2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

2.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan salah satu indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan atau melayani kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran, kebijakan dan program pembangunan infrastruktur dan dapat dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja penyediaan maupun pelayanan infrastruktur. IKLI merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama dalam sub Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index) yang diukur dengan satuan persentase (%). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban, nilai IKLI pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 81,5%. Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing variable di masing-masing infrastruktur, maka didapatkan hasil akhir Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah 84,35% atau masuk pada capaian kategori memuaskan dengan realisasi 105,44%. Hal ini berarti sudah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan. Meskipun sudah termasuk dalam kategori memuaskan, masih diperlukan peningkatan kualitas ketersediaan dan kualitas layanan di masing-masing infrastruktur.

2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 3.2 Perbandingan Index Kualitas Layanan Infrastruktur
beberapa Tahun Terakhir



Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2022, sehingga dapat dilihat mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Tuban mengalami kenaikan terus menerus dari Nilai 77,86 hingga 84,35, dengan Cakupan Indikator Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana.

2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 84,00, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 84,35 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 100,42 %.

2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya mencapai indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Namun, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian target kinerja tersebut. Berikut adalah uraian upaya nyata yang telah dilakukan dan hambatan yang dihadapi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jalan yang optimal sebagai pendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, perbaikan jalan rusak, rehabilitasi jembatan, dan



pengaspalan ulang di jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan kawasan permukiman;

2. Melakukan survei dan pemetaan kondisi jalan serta jembatan secara berkala untuk menyusun perencanaan yang lebih akurat dan prioritas yang tepat sasaran;
3. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur melalui APBD, serta mengupayakan dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun dan memelihara jalan serta jembatan.

Hambatan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur meliputi Dana yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan yang terus meningkat. Proyek besar membutuhkan investasi yang signifikan, sementara alokasi anggaran kerap kali terdistribusi ke sektor lain yang juga menjadi prioritas. Pengadaan material, dan pengelolaan kontrak sering memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan, Hambatan birokrasi ini menyebabkan keterlambatan dalam eksekusi proyek pembangunan atau rehabilitasi. Untuk mengatasi ketidaktercapaian indikator cakupan konektivitas wilayah, diperlukan langkah-langkah strategis yang berupa alternatif Solusi yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Regulasi Penggunaan Jalan, yaitu Menerapkan kebijakan yang ketat untuk mengatur penggunaan jalan oleh kendaraan berat, termasuk pembatasan muatan dan rute khusus.
2. Memastikan alokasi anggaran lebih fokus pada proyek-proyek prioritas yang mendukung konektivitas utama antar wilayah.
3. Optimalisasi Perencanaan dan Prioritas Pembangunan, Menggunakan pendekatan berbasis data untuk menentukan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat.
4. Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan, melakukan audit tahunan terhadap proyek jalan dan jembatan untuk mengevaluasi progres, kendala, dan dampak pembangunan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang sudah ada dan memberikan edukasi tentang pentingnya keberlanjutan infrastruktur.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Keberhasilan dalam meningkatkan cakupan konektivitas jalan dan jembatan di Kabupaten Tuban tidak hanya mendukung mobilitas

masyarakat tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

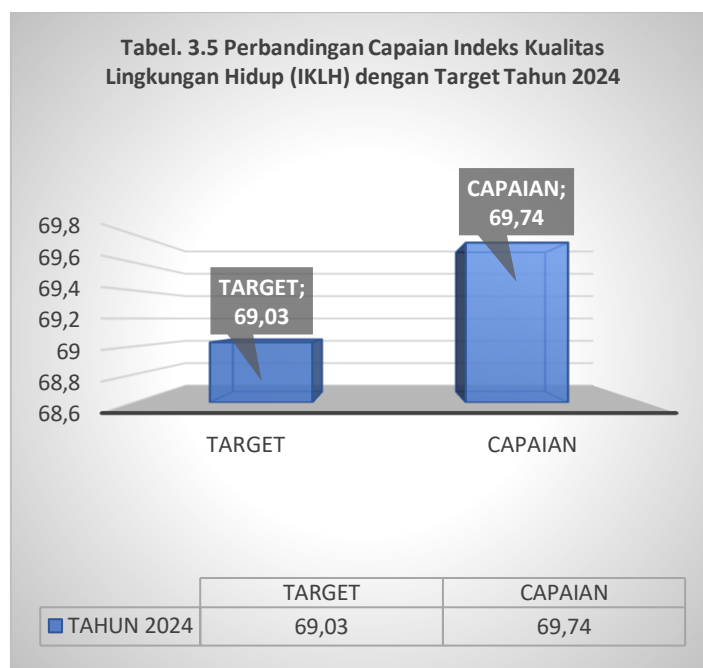
2.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	105,44	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	133.781.543.300	121.204.556.811	95,55	9,89
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.786.248.600	14.650.551.882		
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	100.000.000	99.644.700		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.880.558.600	12.838.579.655		
		Program Penataan Bangunan Gedung	8.357.187.450	8.124.507.100		
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	54.523.572.402	42.740.016.854		
		Program Penyelenggaraan Jalan	352.996.522.310	347.127.991.425		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.000.000.000	1.291.143.465		
		Program Kawasan Permukiman	4.002.500.000	3.836.142.056		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100.134.972.424	99.014.023.000		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	133.857.190.580	130.148.080.487		

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut :



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Hal utama pembangunan bidang lingkungan hidup dari besarnya nilai indeks ini yang akan dicapai melalui upaya pengendalian pencemaran air dan udara dengan peningkatan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara serta Indeks Kualitas Lahan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah sebesar 69,74 sedangkan target tahun 2024 adalah sebesar 69,03 dengan persentase capaian sebesar 109,57%. Adapun beberapa komponen pendukungnya adalah sebagaimana berikut pada tabel dibawah ini :

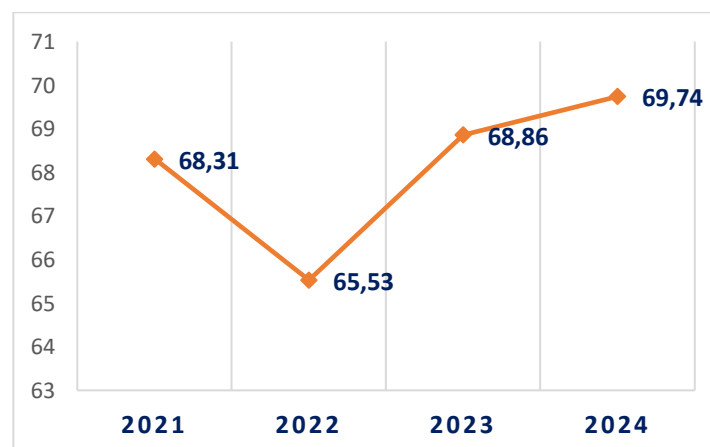
Tabel 3.6 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

NO	INDIKATOR	NILAI
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,72
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,89
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,39
	IKLH KABUPATEN TUBAN	69,74

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2024

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 3.3 IKLH Kabupaten Tuban beberapa tahun terakhir



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya yaitu 68,86 di Tahun 2023 menjadi 69,74 di Tahun 2024.

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 84,00, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 84,35 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 100,42 %.

3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut :

	Kab.Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74 (Sangat Baik)	70,34 (Sangat Baik)	63,33 (Sangat Baik)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban termasuk dalam kategori sangat baik jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Diukur dari 3 indeks yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan. Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai tanpa satuan yang menggambarkan kualitas air berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter/indikator kualitas air. IKA memberikan informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk publik dan pengambil kebijakan.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 58,72

Tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

- Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair;
- Meningkatnya ketaatan perusahaan penghasil limbah cair;
- Meningkatnya jumlah komunitas peduli lingkungan/kelompok masyarakat yang concern terhadap kualitas air sungai/sampah di sungai.

- Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu 89,89

Tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

- Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara;

- b. Ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi;
- c. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 51,39

Tercapainya Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam urusan lingkungan hidup dipengaruhi oleh:

- a. Penanaman dan penghijauan yang dilahan terbuka di wilayah Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik swasta/perusahaan, kelompok masyarakat dan pemerintah;
- b. Ketaatan perusahaan dalam penyediaan Ruang terbuka Hijau di masing-masing lokasi/tapak kegiatan;
- c. Pembaruan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melakukan *deleniasi* RTH dan *update* data pada *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
IKLH	105, 44	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.052.499.370	1.921.975.992	96,5	13,07
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.182.891.446	3.163.691.216		
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	35.000.000	33.675.841		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.186.310.400	1.062.049.216		
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	67.177.580	66.984.768		
		Program Pengelolaan Persampahan	18.967.296.000	18.350.806.777		

4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup

4.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah 91,11% dengan kategori Toleransi Sangat Tinggi. Dengan kata lain, Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024 telah mencapai target RPJMD dengan nilai yaitu 91,03%.

Nilai indeks toleransi berdasarkan responden dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai indeks dari kedua gabungan kategori responden, yaitu gabungan responden masyarakat dan gabungan responden pemerintahan. Dari data tabel diatas, kemudian dihipung per 4 indikator toleransi dan dilakukan proporsi sesuai dengan metodologinya. Perhitungan Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024 dapat ditinjau pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3. 7 Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Berdasarkan

Perhitungan Kategori Responden

No	Kategori Responden	Nilai Indeks Per Jenis Toleransi				Nilai Indeks Toleransi 2024	Keterangan
		Toleransi Sosial	Toleransi Politik	Toleransi Agama	Toleransi Budaya/Etnis		
1	Masyarakat Umum	88,76	87,95	88,81	87,37	88,31	Toleransi Sangat Tinggi
2	PAI	87,99	86,94	88,58	85,57	87,39	Toleransi Sangat Tinggi
3	Perangkat Kecamatan	93,78	92,08	93,18	90,97	92,7	Toleransi Sangat Tinggi
4	Ormas/UMKM/Perusahaan	93,28	91,27	93,8	91,04	92,53	Toleransi Sangat Tinggi
5	OPD	95,90	95,00	95,91	94,66	95,46	Toleransi Sangat Tinggi
6	Expert/Akademisi	91,39	88,89	92,73	90,45	91,02	Toleransi Sangat Tinggi

Gabungan Responden	Nilai Indeks Per Jenis Toleransi				Nilai Indeks Toleransi 2024
	Toleransi Sosial	Toleransi Politik	Toleransi Agama	Toleransi Budaya/Etnis	
GABUNGAN MASYARAKAT (Masyarakat Umum + Ormas/UMKM/Perusahaan + Expert/Akademisi)	91,15	89,37	91,78	89,62	90,62
GABUNGAN PEMERINTAHAN PAI + Perangkat Kecamatan + OPD	92,56	91,34	92,56	90,40	91,85

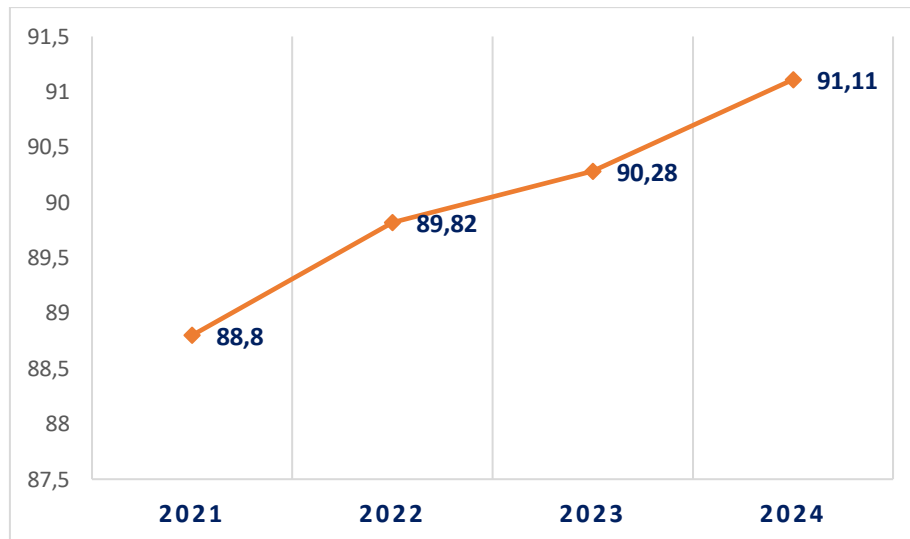
Gabungan Responden	Nilai Indeks Toleransi 2024	Bobot	Hasil Pembobotan Nilai Indeks Toleransi	Nilai Agregat Indeks Toleransi Kabupaten Tuban 2024
GABUNGAN MASYARAKAT (Masyarakat Umum + Ormas/UMKM/Perusahaan + Expert/Akademisi)	90,62	60%	54,37	91,11
GABUNGAN PEMERINTAHAN PAI + Perangkat Kecamatan + OPD	91,85	40%	36,74	

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai Agregat Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah sebesar 91,11%. Nilai tersebut didapatkan melalui pembobotan atau proporsi dari masing-masing responden. Dilakukan pembobotan pada 60% pada gabungan responden masyarakat dan 40% pada gabungan responden pemerintahan. Pembobotan gabungan masyarakat merupakan gabungan kategori responden masyarakat umum, Ormas/UMKM/Perusahaan dan Expert/Akademisi. Ditentukan bobot sebesar 60% pada gabungan masyarakat dikarenakan jumlah responden masyarakat lebih mendominasi dan sebagai sasaran dalam kajian Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024. Untuk gabungan responden pemerintahan ditentukan bobot sebesar 40%, dikarenakan pihak pemerintahan juga terlibat sebagai pembuat kebijakan serta pelaksana kajian Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024. Dengan kata lain, nilai tersebut sudah mencapai target Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat

Tahun 2024 dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 yaitu sebesar 91,03.

4.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 3.4. Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa indeks toleransi di Kabupaten Tuban selama 4 tahun terakhir mengalami tren kenaikan pada tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi di Kabupaten Tuban semakin membaik hingga pada tahun 2024 menyentuh angka 91,11 Pencapaian tersebut sudah melebihi dari target yang dicanangkan pada target RPJMD untuk tahun 2024 sebesar 91,03.

4.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 92,59, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 91,11 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 98,40%. Diperlukan banyak upaya di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur agar target akhir RPJMD dapat tercapai atau tingkat kemajuan sebesar 100%.

4.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Meskipun indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang sangat positif, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga kesinambungan kerukunan di tengah dinamika sosial, politik dan ekonomi yang terus berkembang. Upaya peningkatan

pendidikan tentang toleransi, memperkuat peran lembaga pendidikan, serta menjaga komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk memastikan kerukunan ini terus terjaga. Pemerintah Tuban terus memberikan ruang bagi dialog antar komunitas untuk memperkuat solidaritas sosial.

4.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

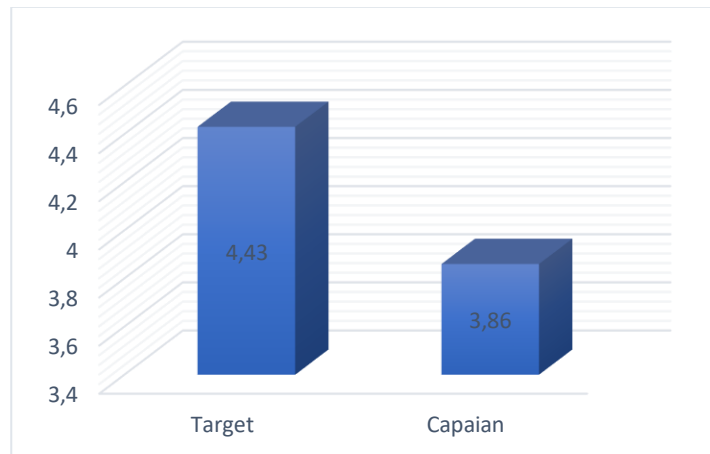
Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	100,09	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.731.298.425	11.092.114.472	98,24	1,85
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.580.000	20.573.000		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.696.868.400	1.420.938.902		
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	52.531.200.900	52.404.059.667		
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	278.809.200	212.424.003		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	432.975.740	365.219.139		

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

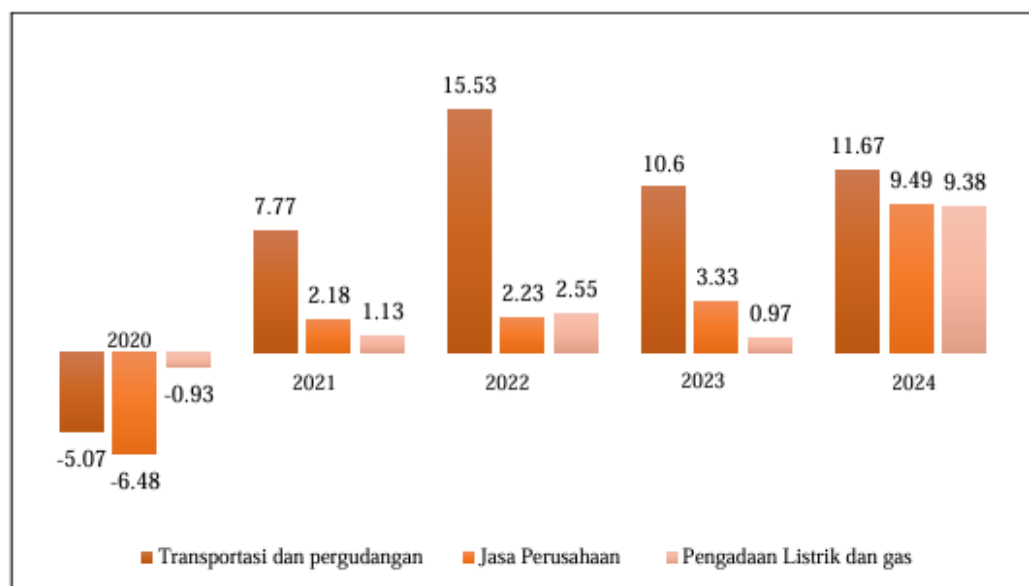
5.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini, Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 mencapai 3,86% dengan target sebesar 4,32 – 4,42%. Sehingga persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 87,13.

Grafik 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban dibandingkan dengan target Tahun 2024



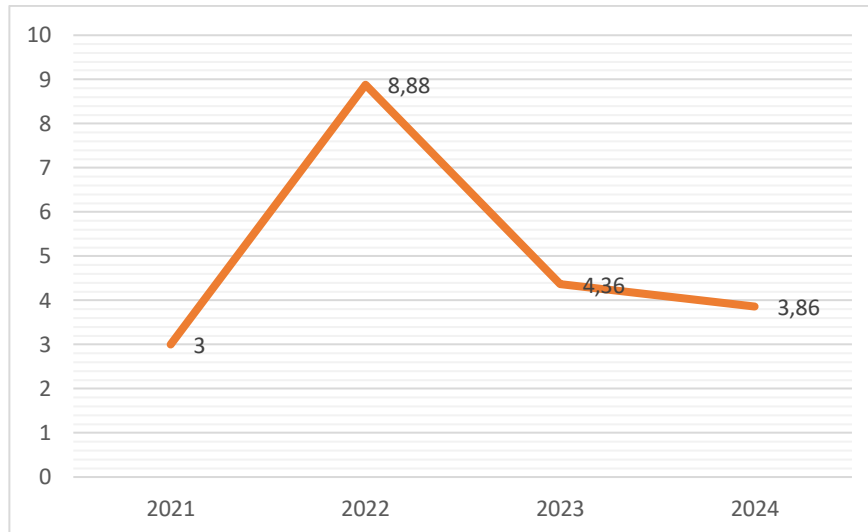
Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami penurunan 0,51 persen poin menjadi sebesar 3,86 persen. Dengan pertumbuhan yang terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha industri pengolahan mengalami pertumbuhan paling rendah yaitu sebesar 1,83%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,67 persen serta jasa perusahaan sebesar 9,49 persen. Mobilitas penduduk yang meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian setelah mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020-2021 mampu memberikan multiplier effect pada beberapa sektor ekonomi.



5.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun terakhir seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.6 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
beberapa Tahun Terakhir :



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban selama 4 tahun terakhir mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir. Namun perekonomian Kabupaten Tuban setelah pandemi covid 19 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

5.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Pada indikator Tingkat Kemiskinan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 5,02 – 5,39%, sedangkan realisasinya di Tahun 2023 menunjukkan 4,36% sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 86,85%. Diperlukan banyak Upaya yang keras untuk bisa mencapai target RPJMD sehingga persentase Tingkat capaian bisa 100%.

5.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2024

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Pemprov Jatim	Nasional
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,86	1,67	4,93	5,03

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban termasuk lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kab. Bojonegoro, namun masih dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

5.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- Perekonomian Kabupaten Tuban tahun 2024 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 87.110,99 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 51.913,41 miliar rupiah.
- Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 3,86 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,12 persen.
- Struktur perekonomian Kabupaten Tuban tahun 2024 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 30,2 persen. Sementara itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mendominasi perekonomian Kabupaten Tuban dari sisi pengeluaran sebesar 54,22 persen.



5.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	87,13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	3.059.893.100	83	4,13
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	4.089.023.371		
		Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	1.447.015.187		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	9.938.574.806		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	49.725.000		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	415.248.760		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	3.337.214.055		
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	114.223.980	109.593.650		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	4.737.541.916		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	104.305.500		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-		
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	4.150.422.867		
		Program Hubungan Industrial	472.700.000	351.316.893		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	1.372.150.883		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.199.800.000	1.196.248.957		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.869.911.220	2.797.045.176		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Haki	225.000.000	220.187.022		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367.692.000	94.010.100		
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.871.139.550	1.618.154.890		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	4.520.000		

		Program Pengelolaan Permuseuman	1.301.610.550	950.513.362		
		Program Pembinaan Sejarah	126.384.000	120.814.000		
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.771.170	460.043.750		
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	521.540.000	506.380.831		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940	2.749.165.781		
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790	664.974.500		
		Program Pengembangan Ekspor	558.669.830	530.568.407		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	209.199.920	206.092.150		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	290.297.880	288.218.372		
		Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	592.000.000	464.942.000		
		Program Pengembangan UMKM	928.897.690	861.729.307		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800	69.653.500		
		Program Penataan Desa	98.086.000	68.532.000		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa				
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083	8.015.386.917		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220	1.243.494.790		
		Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170	735.992.450		
		Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717	1.693.773.850		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.770.445.390	9.809.976.800		
		Program Penanganan Bencana	788.878.550	743.041.000		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546	86.006.100		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.432.440	78.354.000		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352.350.000	351.163.432		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	506.199.600	447.132.277		
		Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	539.100.099		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254.294.400	251.406.381		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458.147.000	457.209.912		

6. Tingkat Kemiskinan

6.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Tingkat kemiskinan tahun 2024 mencapai 14,36% dengan target sebesar 14. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada 2024 mencapai 177,25 ribu jiwa, berkurang 6,01 ribu jiwa dibandingkan kondisi 2023 yang sebesar 171,24 ribu jiwa Sehingga persentase Tingkat Kemiskinan adalah sebesar 97,49% (Sangat Baik), dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tuban pada 2024 sebesar 1,95 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi 2023 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tuban pada 2024 sebesar 0,39 atau turun sebesar 0,03 poin dibandingkan kondisi 2023 yang sebesar 0,42.



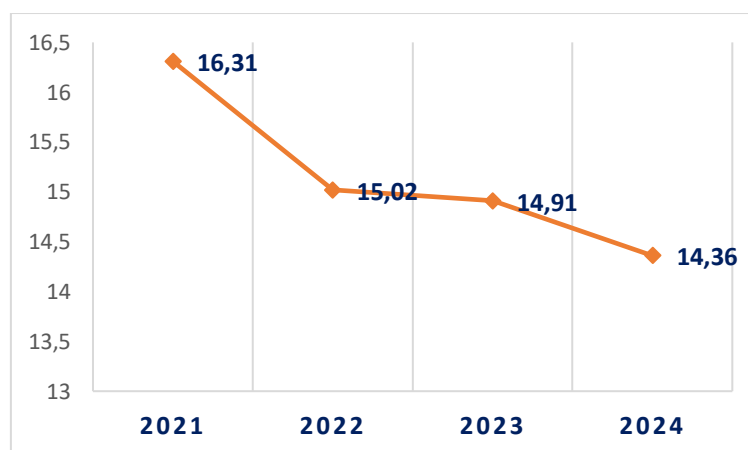
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Badan Pusat Statistik, 2016). Selain itu, masih lemahnya kemampuan daya beli masyarakat karena tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar. Masyarakat miskin disebabkan oleh rendahnya taraf kesehatan dan pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya akses air bersih dan sanitasi serta pengaruh kondisi lingkungan sosial sekitarnya.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuat nya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk

mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin". Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

6.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 3.7 Tingkat Kemiskinan Kab. Tuban Tahun 2021-2024



Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Tingkat Kemiskinan tahun 2024 mengalami penurunan. Untuk diketahui, Pemkab Tuban secara konsisten mampu menurunkan angka kemiskinan dan penduduk miskin pada kurun waktu 2021-2024. Pada tahun 2021, angka kemiskinan berada mencapai 16,31 persen mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 15,02 persen dan kembali turun menjadi 14,91 persen di tahun 2023. Di samping itu, pada tahun 2021, perkiraan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban mencapai 192,58 ribu jiwa mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 178,05 ribu jiwa dan kembali turun menjadi 177,25 ribu jiwa.

6.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Tingkat Kemiskinan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 13,00 %, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 14,91% sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 87,19%. Diperlukan banyak Upaya yang keras untuk bisa mencapai target RPJMD sehingga persentase Tingkat capaian bisa 100%.

6.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 3.9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan	Pemprov Jatim
Tingkat Kemiskinan	14,36	11,69	12,16	9,79

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan provinsi. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya menurunkan angka kemiskinan.

6.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas menjadi bukti komitmen Pemkab Tuban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban didasarkan data terpadu. Salah satunya dengan memanfaatkan hasil pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Survei Regsosek) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, Melihat data kemiskinan yang ada, bagaimana karakteristik demografi penduduk di Kabupaten Tuban memiliki dampak yang besar terhadap angka kemiskinan cukup tinggi. Beberapa faktor diantaranya :

- Kemiskinan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, tetapi didominasi oleh wilayah pedesaan
- Banyak orang tua di pedesaan yang ditinggal anak-anaknya ke luar daerah untuk merantau
- Banyak warga yang bekerja serabutan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak

- Kondisi rumah yang tidak layak

Mengacu pada hasil Susenas 2024 dari BPS, Pemerintah Kabupaten Tuban telah memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan diantaranya :

- Pertama, Pemkab Tuban menekan laju inflasi daerah dengan pemantauan harga pasar dan kemampuan daya beli masyarakat.
- Mengoptimalkan bantuan yang ditujukan untuk UMKM atau masyarakat di Desil 3. Bantuan tersebut akan membawa multiplier effect bagi UMKM dan masyarakat Desil 3. Bagi pelaku UMKM, bantuan permodalan akan menjadi faktor pendongkrak pengembangan usaha yang digeluti. Sedangkan, bagi masyarakat Desil 3 akan menjadi perintisan usaha baru yang diharapkan dapat menjaga masyarakat agar tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.
- Mengawal bantuan sosial agar tepat sasaran Desil 1 dan Desil 2. Bantuan sosial memang ditujukan untuk masyarakat di Desil 1 dan Desil 2. Harapannya, mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga mampu menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

6.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Tingkat Kemiskinan	97,49	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	3.059.893.100	83	14,49
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	4.089.023.371		
		Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	1.447.015.187		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	9.938.574.806		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	49.725.000		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	415.248.760		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	3.337.214.055		
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	114.223.980	109.593.650		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	4.737.541.916		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797		

		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	104.305.500		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-		
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	4.150.422.867		
		Program Hubungan Industrial	472.700.000	351.316.893		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	1.372.150.883		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.199.800.000	1.196.248.957		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.869.911.220	2.797.045.176		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Haki	225.000.000	220.187.022		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367.692.000	94.010.100		
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.871.139.550	1.618.154.890		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	4.520.000		
		Program Pengelolaan Permuseuman	1.301.610.550	950.513.362		
		Program Pembinaan Sejarah	126.384.000	120.814.000		
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.771.170	460.043.750		
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	521.540.000	506.380.831		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940	2.749.165.781		
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790	664.974.500		
		Program Pengembangan Ekspor	558.669.830	530.568.407		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	209.199.920	206.092.150		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	290.297.880	288.218.372		
		Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	592.000.000	464.942.000		
		Program Pengembangan UMKM	928.897.690	861.729.307		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800	69.653.500		
		Program Penataan Desa	98.086.000	68.532.000		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa				
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083	8.015.386.917		

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220	1.243.494.790		
	Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170	735.992.450		
	Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717	1.693.773.850		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.770.445.390	9.809.976.800		
	Program Penanganan Bencana	788.878.550	743.041.000		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546	86.006.100		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.432.440	78.354.000		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352.350.000	351.163.432		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	506.199.600	447.132.277		
	Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	539.100.099		
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254.294.400	251.406.381		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458.147.000	457.209.912		

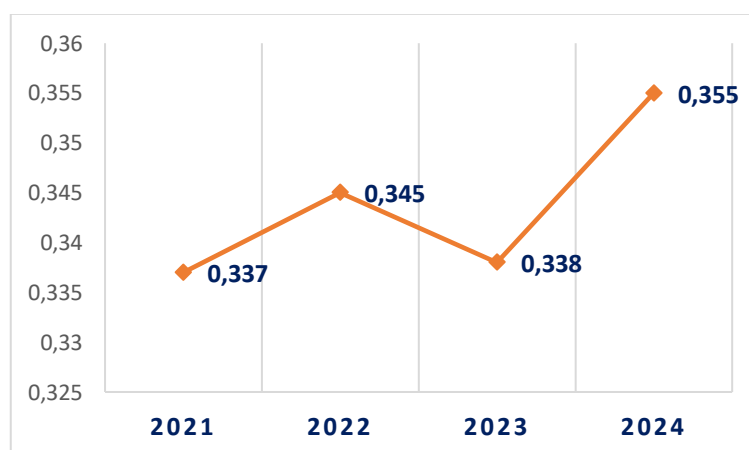
7. Gini Ratio

7.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Gini Ratio tahun 2024 mencapai 0,355 sedangkan targetnya adalah sebesar 0,31 – 0,344 dengan persentase capaian sebesar 96,90% (Sangat Baik). Gini Ratio memiliki nilai antara 0 hingga 1. Jika nilainya semakin mendekati satu, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin lebar atau timpang, atau mendekati ketimpangan sempurna. Hal sebaliknya, jika nilainya semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan menunjukkan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Gini Ratio kurang dari 0,3 akan masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah, sedangkan Gini Ratio yang bernilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori sedang dan nilai Gini Ratio lebih dari 0,5 berada dalam kategori ketimpangan yang tinggi. Gini Ratio memiliki kelemahan, yaitu besarnya nilai gini ratio tidak dapat menjelaskan dimana letak ketimpangannya. Sehingga untuk mengatasi kelemahan ini, biasanya akan disandingkan ukuran ketimpangan yang lain untuk melengkapi, salah satu yang paling umum adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ketimpangan dengan metode ini dilakukan dengan membagi penduduk ke dalam 3 kelompok pendapatan, yakni kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi.

7.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 3.8 Gini Ratio Kab. Tuban Tahun 2021-2024



Capaian Kinerja Gini Ratio Kab. Tuban tahun 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2021 sampai 2024 cenderung fluktuatif, Pada tahun 2021 Gini Ratio Kabupaten Tuban 0,337, angka ini naik di tahun 2022 menjadi 0,345 dan turun pada tahun 2023 menjadi 0,338.

7.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian nilai Gini Ratio Kabupaten Tuban tahun 2024 (0,355) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (0,310-0,340) sudah mencapai 91,72%. Masih diperlukan upaya-upaya dari Kabupaten Tuban untuk mencapai di akhir tahun RPJMD.

7.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 3.10 Gini Ratio Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan	Pemprov Jatim
Gini Ratio	0,355	0,310	0,281	0,372

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Gini Ratio di Kabupaten Tuban lebih tinggi jika dibandingkan dengan kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan namun angka tersebut masih dibawah Gini Ratio dari Pemerintah Provinsi.

7.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Secara teoritis dan empiris kenaikan ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan kondisi perekonomian di suatu daerah. Berdasarkan data PDRB dari BPS, pada tahun 2024, hampir keseluruhan sektor mengalami laju pertumbuhan negatif (perlambatan) kecuali pada sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor Informasi dan Komunikasi menduduki posisi pertama sebagai sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi, diikuti sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sebesar 15,53 persen. Akan tetapi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan yang paling rendah, yaitu sebesar 0,71 persen. Mobilitas penduduk yang meningkat seiring membaiknya pandemi pada tahun 2024, mampu memberikan multiplier effect pada beberapa sektor ekonomi. Meningkatnya produksi Semen Indonesia juga memberikan efek cukup signifikan terhadap pertumbuhan di sektor Industri Pengolahan.

Upaya yang telah dilakukan untuk pengurangan Gini Ratio :

- a. Menurunkan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, memberikan tambahan gizi untuk ibu hamil dan balita;
- b. Stabilitas harga pangan dan subsidi tepat sasaran;
- c. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan memberikan pelatihan dan job fair bagi para pencari kerja;
- d. Kredit bagi UMKM pertanian dan perikanan;
- e. Industri kecil, pemaksimalan potensi lokal, peningkatan skala usaha petani dan nelayan.

7.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Gini Ratio	96,60	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	3.059.893.100	83	13,6
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	4.089.023.371		
		Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	1.447.015.187		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	9.938.574.806		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	49.725.000		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	415.248.760		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	3.337.214.055		
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	114.223.980	109.593.650		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	4.737.541.916		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	104.305.500		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-		
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	4.150.422.867		
		Program Hubungan Industrial	472.700.000	351.316.893		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	1.372.150.883		

	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.199.800.000	1.196.248.957		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.869.911.220	2.797.045.176		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Haki	225.000.000	220.187.022		
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367.692.000	94.010.100		
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.871.139.550	1.618.154.890		
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	4.520.000		
	Program Pengelolaan Permuseuman	1.301.610.550	950.513.362		
	Program Pembinaan Sejarah	126.384.000	120.814.000		
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.771.170	460.043.750		
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	521.540.000	506.380.831		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940	2.749.165.781		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790	664.974.500		
	Program Pengembangan Ekspor	558.669.830	530.568.407		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	209.199.920	206.092.150		
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	290.297.880	288.218.372		
	Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	592.000.000	464.942.000		
	Program Pengembangan UMKM	928.897.690	861.729.307		
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800	69.653.500		
	Program Penataan Desa	98.086.000	68.532.000		
	Program Peningkatan Kerjasama Desa				
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083	8.015.386.917		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220	1.243.494.790		
	Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170	735.992.450		
	Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717	1.693.773.850		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.770.445.390	9.809.976.800		
	Program Penanganan Bencana	788.878.550	743.041.000		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546	86.006.100		

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.432.440	78.354.000		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352.350.000	351.163.432		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	506.199.600	447.132.277		
		Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	539.100.099		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254.294.400	251.406.381		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458.147.000	457.209.912		

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

8.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

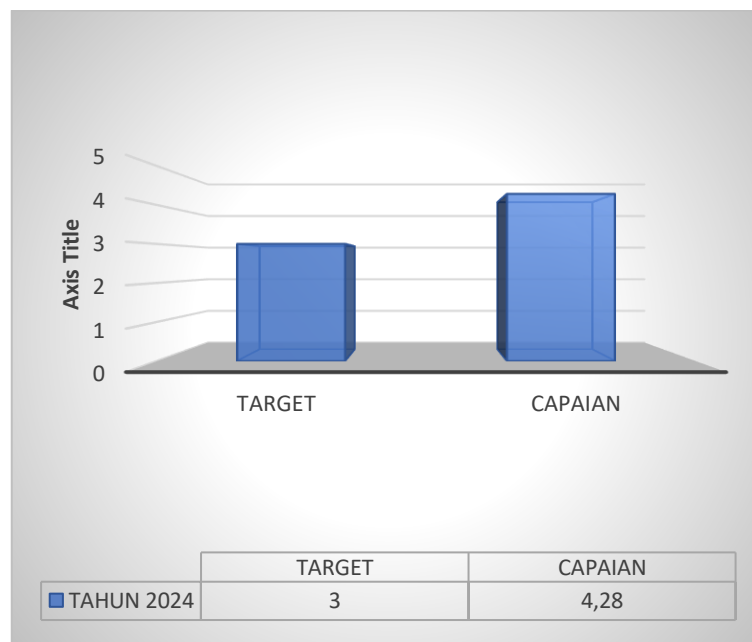
$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan Tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Capaian Indeks Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 mencapai 4,28%, sedangkan targetnya adalah sebesar 3% dengan persentase capaian sebesar 70,09.

Grafik 3.9 Perbandingan Target dan Capaian Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024



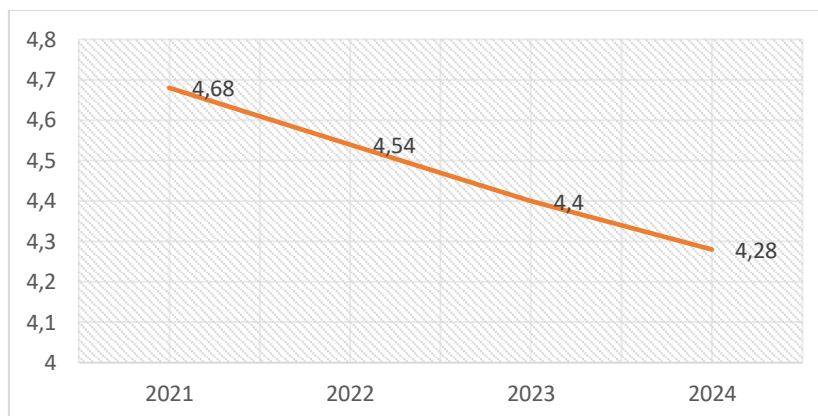
8.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dari tahun 2021 sampai 2024 cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2022 TPT Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 4,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,68%. Sedangkan pada

tahun 2023 TPT Kabupaten Tuban turun menjadi 4,4%. Dan di tahun 2024 mengalami penurunan Kembali menjadi 4,28

Grafik 2.3.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tuban

Tahun 2021-2024



8.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban tahun 2024 (4,28) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (3) sudah mencapai 70,09%. Masih diperlukan upaya-upaya yang signifikan dari Kab. Tuban untuk dapat menyelesaikan permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga akhir RPJMD.

8.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan	Pemprov Jatim
TPT	4,28	4,42	4,34	4,19

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tuban masih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Kabupaten Tuban berada pada posisi ke-13 yakni sebesar 4,28 persen diantara kabupaten dan kota yang lain di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban pada tahun 2024 berada di posisi ke-13 dengan TPT terendah diantara kabupaten/kota lainnya, bahkan lebih rendah dari TPT Jawa Timur (4,19 persen) yaitu sebesar 4,28 persen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pasar tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Tuban dapat menyerap jumlah tenaga kerja dengan baik.

8.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor jasa sebesar 40 persen, kemudian sektor pertanian sebesar 39,52 persen dan sektor Manufaktur sebesar 20,47 persen.

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerja Utama Tahun 2024.

Sektor	Serapan Lapangan Pekerjaan (%)	Kontribusi Ekonomi (%)	Keterangan
Pertanian	39,52	18,50	Produktifitas rendah
Jasa, lain-lain	40,00	50,81	Produktifitas sedang
Manufaktur, pengolahan	20,47	30,69	Produktifitas tinggi

Permasalahan utama penduduk yang bekerja di sektor jasa menyumbang cukup besar, yaitu 39,52 persen, namun sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tuban hanya 18,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penduduk yang bekerja di sektor pertanian belum optimal atau tergolong rendah. Oleh karena itu upaya peningkatan potensi pertanian perlu ditingkatkan. Sementara produktifitas penduduk yang bekerja di sektor jasa, lain-lain tertinggi di antara sektor-sektor lainnya

Tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Kabupaten Tuban berada pada posisi ke-13 yakni sebesar 4,28 persen diantara kabupaten dan kota yang lain di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban pada tahun 2024 berada di posisi ke-13 dengan TPT terendah diantara kabupaten/kota lainnya, bahkan lebih rendah dari TPT Jawa Timur (4,19 persen) yaitu sebesar 4,28 persen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pasar tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Tuban dapat menyerap jumlah tenaga kerja dengan baik.

Berikut program pengentasan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang telah dilaksanakan dan akan lebih masif di tahun berikutnya.

(1). Merevitalisasi program *job-fair* secara masif dan periodik

- Adanya forum rutin antar OPD terkait yang bertujuan untuk mencocokkan kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja.

- Tersedianya program konseling karir yang menghubungkan siswa SMA/SMK dengan para ahli bimbingan konseling kegiatan tersebut mencakup pemahaman potensi diri, orientasi karir, dan perencanaan karir.
- (2). Memudahkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban
- Pemetaan dan penetapan pengembangan kawasan industri manufaktur, kreatif dan otomotif;
 - Perkembangan proses pemberian fasilitas atau insentif dalam sektor penanaman modal dan investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota.
- (3). Mengoptimalkan fungsi BLK untuk meng-*upgrade* kompetensi angkatan kerja yang berpendidikan SLTA dan SMK sesuai dengan kebutuhan pasar di industri dan bidang jasa
- Mengoptimalkan BLK untuk mendukung industri manufaktur, industri kreatif, industri otomotif, dengan meningkatkan kapasitas instruktur agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri dan perubahan ekonomi kreatif.
 - Lembaga sertifikasi memberi informasi secara periodik terkait pelatihan kerja.
 - Mencocokkan kebutuhan industri dengan struktur angkatan kerja tersedia Ketika akan memberi pelatihan.
- (4). Penyusunan program petani milenial (petani muda) untuk menciptakan petani yang modern dan berkelanjutan.
- Sosialisasi dan perubahan *mindset* generasi milenial terhadap pekerjaan petani dengan menonjolkan keunggulan dari *smart farming* dan pemanfaatan teknologi.
 - Pemetaan potensi transformasi digital dan pemanfaatannya terhadap generasi milenial agar mau menjadi petani.
 - Mendatangkan dan mengirimkan duta petani milenial untuk *sharing* terkait pengalaman sukses petani milenial.
- (5). Program Petani Milenial (Petani Muda) adalah program pengembangan wirausaha tani yang melibatkan petani-petani muda di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta korporasi/para pemangku kepentingan lain agar terciptanya ekosistem pertanian yang mandiri, maju dan berkelanjutan.
- (6). Penyusunan *database* ketenagakerjaan
- Mengidentifikasi calon pencari kerja melalui sekolah yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan untuk mengidentifikasi kompetensi, sementara Dinas Tenaga Kerja dan Industri mengidentifikasi industri atau pasar yang membutuhkan.
 - Hasil identifikasi kompetensi dan kebutuhan di integrasikan dalam satu sistem database.

9. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

9.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Kategori PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survey khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan Cultivated Biological Resources (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen di awal periode disebut sebagai Work In Progres (WIP). Pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkap.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas dasar harga dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (intermediate consumption).

Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024 mencapai 2,18%, sedangkan targetnya adalah sebesar 1,45% dengan persentase capaian sebesar 132,12.

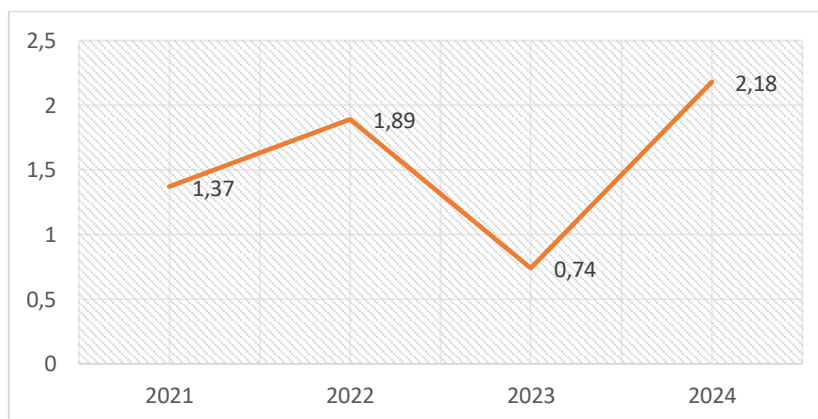
Grafik 3.10 Perbandingan Target dan
Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2024



9.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir beberapa tahun terakhir

PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban terlihat fluktuatif dari tahun 2021 sampai 2024, Pada tahun 2022 PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 1,89 dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 1,37. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban turun menjadi 0,74%. Dan di tahun 2024 mengalami kenaikan Kembali menjadi 2,18.

Grafik 3.11 Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Kab. Tuban Tahun 2021-2024



9.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah 2,18% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2,04% telah mencapai 106,86%. Hal ini menunjukkan bahwa target IPLM kedepan sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian target kinerja.

9.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target kinerja tahun 2024 tidak lepas dari berbagai upaya telah dilakukan atas pencapaian kinerja, diantaranya dalam bidang perikanan berupa pemberian bantuan hibah perahu dan alat tangkap ikan ramah lingkungan, rehabilitasi TPI Karangagung berupa pengerukan dermaga, rehabilitasi kolam di BBI Kecamatan Singgahan dan Kecamatan Rengel, Pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan serta bantuan sarana prasarana untuk budidaya ikan. Bantuan hibah pengolahan pakan ternak untuk peternakan. Selain itu pemberian bantuan hibah berupa sarana dan prasarana pertanian juga terus ditingkatkan diantaranya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan sumur bor, pengembangan area tanam untuk bawang merah dan kacang tanah, pemberian alsintan dan lain sebagainya. Dalam rangka ketahanan pangan dan penurunan angka stunting diberikan bantuan kebun B2SA untuk 155keluarga resiko stunting.



Guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan maka perlu diambil kebijakan yang nantinya lebih membawa dampak positif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diantaranya agar produksi pertanian dapat lebih meningkat maka perlu diadakan penelitian terkait analisa tanah di masing-masing kecamatan sehingga nantinya akan dapat diketahui potensi yang dapat dimaksimalkan dan teknologi yang harus digunakan agar lebih tepat sasaran. Selain itu pengembangan korporasi petani juga harus lebih ditingkatkan lagi ke daerah-daerah lain sesuai dengan spesifik lokasi. Pemberian bantuan atau fasilitasi permodalan

petani dengan pihak perbankan yang dapat membantu petani untuk lebih maju, fasilitasi pasar dan stabilisasi harga di tingkat petani dengan bekerja sama dengan pihak lain, baik itu sesama perangkat daerah maupun instansi di luar kedinasan. Terkait dengan pelaksanaan kebun B2SA agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan maka selanjutnya diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti desa maupun Dinas Sosial P3A. Begitupula dengan penguatan cadangan pangan dapat bekerjasama dengan pihak Bulog untuk penyerapan hasil panen petani terutama untuk padi dan jagung sehingga bisa meminimalisir peran tengkulak. Guna meningkatkan nilai tambah baik bidang pertanian, peternakan maupun perikanan selanjutnya dapat diperbanyak bentuk kegiatan yang memiliki daya ungkit yang besar untuk masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan peningkatan minat pemuda dalam dunia pertanian, peternakan maupun perikanan.

9.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	132,13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	3.059.893.100	92,61	39,51
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	4.089.023.371		
		Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	1.447.015.187		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	9.938.574.806		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	49.725.000		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	415.248.760		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	3.337.214.055		
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	114.223.980	109.593.650		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	4.737.541.916		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130		

10. PDRB Sektor Industri Pengolahan

10.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

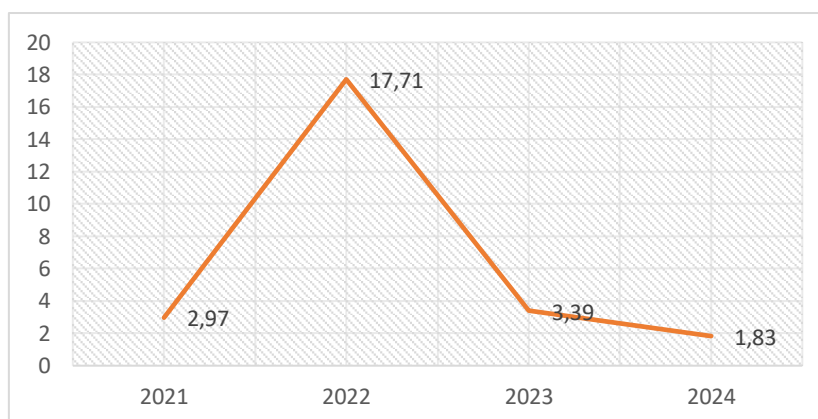
Realisasi PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun 2024 adalah 1,83% sedangkan targetnya adalah sebesar 3,82% dengan persentase capaian sebesar 38,69%.

10.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir beberapa tahun terakhir

PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban terlihat fluktuatif dari tahun 2021 sampai 2024, Pada tahun 2022 PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 17,71 dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 2,97. Sedangkan pada tahun 2023 TPT Kabupaten Tuban turun menjadi 3,39%. Dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 1,83.

Grafik 3.12 PDRB Sektor Industri Pengolahan Kab. Tuban

Tahun 2021-2024



10.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah 1,83% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 5,03% baru mencapai 36,38%. Hal ini menunjukkan bahwa target PDRB Sektor Industri Pengolahan realisasi masih jauh dari capaian di akhir RPJMD, Pemerintah Kabupaten Tuban harus lebih berupaya lebih keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

10.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Permasalahan/Kendala dalam pencapaian target PDRB Sektor Industri Pengolahan :

- a. Terbatasnya akses pemasaran, promosi dan permodalan bagi sebagian besar pelaku Industri Kecil dan Menengah;
- b. Rendahnya pemahaman pelaku Industri Kecil Menengah tentang pentingnya usaha dalam bentuk kelompok dalam rangka peningkatan efisiensi dan peningkatan kualitas dalam memproduksi yang berdampak pada rendahnya kualitas produk yang dihasilkan;
- c. Kurangnya inisiatif pelaku usaha dalam mempromosikan produknya (masih mengandalkan fasilitasi pemerintah) serta kurangnya penguasaan Teknologi Informasi sehingga masih menggunakan cara yang konvensional;
- d. Kebanyakan peralatan produksi yang digunakan pelaku usaha masih tradisional serta kurang pemahaman akan pentingnya legalitas usaha serta faktor pencemaran lingkungan pada proses produksi; dan
- e. Keterbatasan pengetahuan pelaku IKM terkait tata cara pengisian aplikasi SIINas.

Solusi alternatif yang telah dilakukan :

- i. Memperbanyak pendampingan kepada Pelaku Industri Kecil dan Menengah guna peningkatan legalitas berusaha dan standarisasi produk;
- ii. Optimalisasi pelatihan produksi Para Pelaku Industri Kecil dan Menengah maupun masyarakat umum berbasis potensi unggulan daerah;
- iii. Memperbanyak kesempatan Pelaku Industri Kecil dan Menengah untuk mengakses pasar lokal maupun internasional melalui event, destinasi wisata maupun pameran produk;
- iv. Memperluas akses pelayanan rumah kemas serta peningkatan alat kemas yang berstandar ekspor;
- v. Sosialisasi dan bimtek pengisian SIINas dengan peserta dari pelaku usaha sektor industri;
- vi. Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi para pencari kerja;
- vii. Mendorong peran lembaga pelatihan swasta untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pencari kerja;
- viii. Meningkatkan antusiasme pencari kerja dalam mengikuti bursa kerja serta mempermudah akses pasar kerja secara online;

- ix. Mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak;
- x. Memperbanyak ruang komunikasi antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan potensi perselisihan hubungan industrial;
- xi. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi HAI NAKER dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan media informasi lowongan kerja.

10.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	38,69	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797	91,05	-52,36
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	104.305.500		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797		
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	4.150.422.867		
		Program Hubungan Industrial	472.700.000	351.316.893		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	1.372.150.883		

11. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

11.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

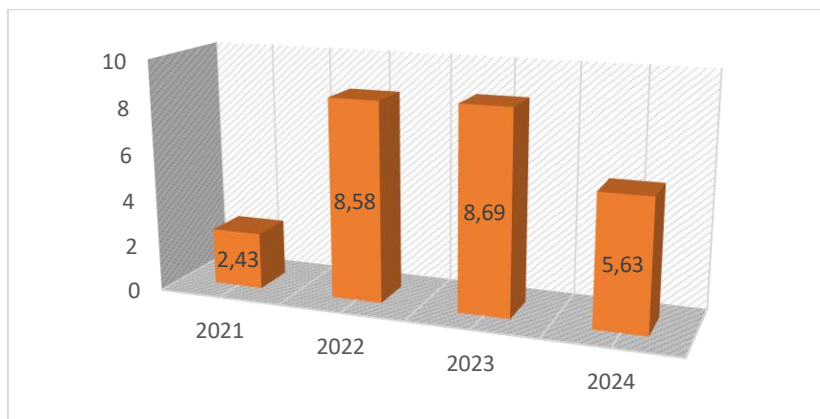
Realisasi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2024 adalah 5,63% sedangkan targetnya adalah sebesar 6,43% dengan persentase capaian sebesar 82,67%.

11.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir beberapa tahun terakhir

PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tuban terlihat fluktuatif dari tahun 2021 sampai 2024, Pada tahun 2022 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 8,58 dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 2,43. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tuban naik menjadi 8,69%. Dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,63.

Grafik 3.13 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kab. Tuban

Tahun 2021-2024



11.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah 5,63% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 7,53% baru mencapai 74,77%. Hal ini menunjukkan bahwa target PDRB Sektor Industri Pengolahan realisasi masih jauh dari capaian di akhir RPJMD, Pemerintah Kabupaten Tuban harus lebih berupaya lebih keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

11.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Permasalahan/Kendala dalam pencapaian target PDRB Sektor Industri Pengolahan :

Jumlah kunjungan wisata di Tuban mengalami penurunan dari **6.817.285** pada tahun 2023 menjadi **6.041.253** pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya kemungkinan faktor yang mempengaruhi penurunan, seperti kondisi ekonomi, atau daya tarik wisata yang menurun. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah juga mengalami penurunan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut antara lain kondisi fasilitas yang kurang memadai serta keterbatasan dalam revitalisasi

factor-faktor penyebab lesunya kunjungan wisata di beberapa lokasi :

- Pantai Boom

Penurunan jumlah pengunjung di Pantai Boom disebabkan oleh beberapa kendala, di antaranya banyaknya fasilitas permainan yang mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perbaikan. Selain itu, hingga saat ini belum ada program revitalisasi yang dilakukan, padahal kondisi pantai sudah membutuhkan pembaruan guna meningkatkan daya tarik wisatawan. Selain itu, area lahan parkir yang berdekatan dengan Pasar Sore juga menimbulkan kendala tersendiri dalam hal kenyamanan dan aksesibilitas bagi.

- Goa Akbar

Daya tarik wisata Goa Akbar dinilai kurang optimal karena lokasinya yang berdekatan dengan Pasar Baru Tuban. Hal ini menyebabkan akses menuju kawasan wisata kurang nyaman dan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.

- Pemandian Bektiharjo

Destinasi wisata Pemandian Bektiharjo juga mengalami penurunan jumlah kunjungan, salah satunya disebabkan oleh kondisi fasilitas yang sudah memerlukan pembaruan. Hingga saat ini, usulan revitalisasi masih dalam tahap perencanaan dan belum direalisasikan, sehingga belum ada peningkatan signifikan dalam daya tarik wisatawan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah strategis berupa perbaikan

fasilitas, percepatan program revitalisasi, serta peningkatan tata kelola destinasi wisata agar dapat kembali menarik minat wisatawan dan meningkatkan sektor pariwisata daerah.

Upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tuban antara lain :

1. Pengembangan dan penguatan objek wisata yang khas.
2. Memperbaiki dan merawat sarana prasarana menuju objek wisata.
3. Menyediakan dan memperbaiki fasilitas yang ada di objek wisata.
4. Meningkatkan promosi dan menjaga citra objek wisata.
5. Menyediakan layanan penunjang tambahan di objek wisata.
6. Menentukan tarif yang bersaing untuk objek wisata beserta infrastruktur pendukung lainnya.
7. Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
8. Meningkatkan kerja sama (networking) dengan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata.

11.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,67	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1199800000	1196248957	87,57	-4,9
		Program Pemasaran Pariwisata	425000000	421013279		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2869911220	2797045176		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	225000000	220187022		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367692000	94010100		
		Program Pengembangan Kebudayaan	1871139550	1618154890		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	89450000	4520000		
		Program Pengelolaan Permuseuman	1301610550	950513362		
		Program Pembinaan Sejarah	126384000	120814000		

12. Tingkat Inflasi Daerah

12.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

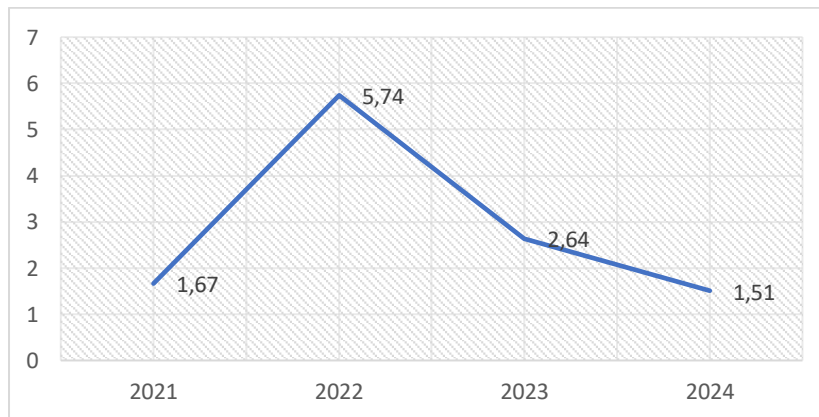
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Untuk Capaian Kinerja Tingkat Inflasi Daerah adalah 1,51% sedangkan target tahun 2024 sesuai dengan renstra perencanaan adalah 1-2% sehingga realisasi di tahun ini adalah 100% (sangat baik).

12.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian Tingkat Inflasi Daerah Kab. Tuban tahun 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

• Grafik 3.14 Tingkat Inflasi Daerah Kab. Tuban Tahun 2021-2024



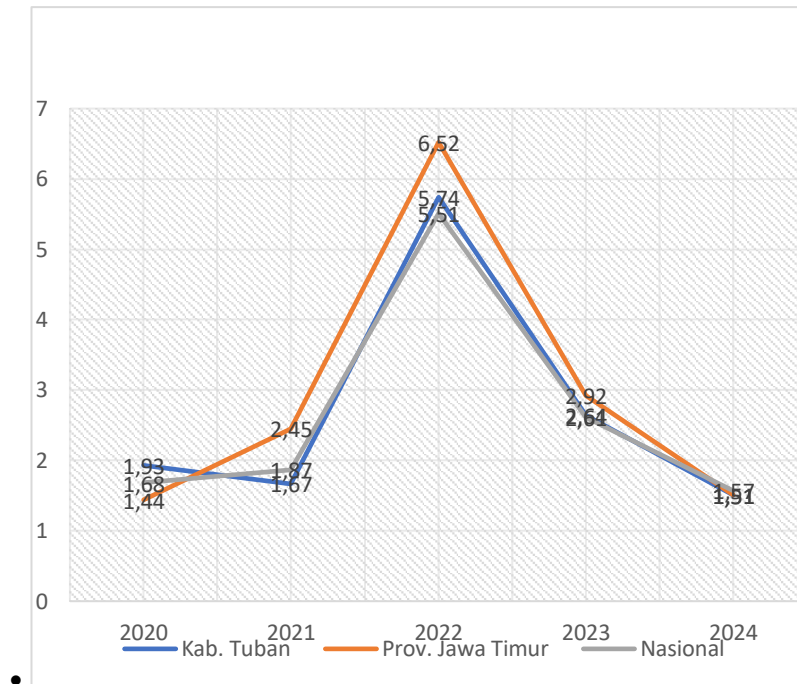
Dari grafik diatas dapat dilihat tahun 2024 merupakan Tingkat Inflasi paling rendah jika dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. Tingkat Inflasi Daerah sempat menyentuh angka 5,74% di Tahun 2022 naik dari tahun 2021 yaitu 1,67%.

12.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tingkat Inflasi Daerah sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Capaian Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban tahun 2024 1,51% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 1-2% sudah terncapai 100%.

12.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 3.13 Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi, Nasional



	Kab. Tuban	Pemprov Jatim	Nasional
Tingkat Inflasi 2024	1,51	1,51	1,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Inflasi Daerah di Kabupaten Tuban masih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Nasional serta memiliki Tingkat inflasi yang sama dengan Provinsi Jawa Timur.

12.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, harga bawang putih di pasar Kabupaten Tuban pada akhir 2024 mencapai Rp 38.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp 37.000 per kilogram. Harga bawang merah juga mengalami penurunan dari Rp

28.333 per kilogram menjadi Rp 25.000 per kilogram. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, inflasi tercatat sebesar 0,56 persen. Harga gula pasir mengalami kenaikan 0,89 persen, sementara cabai rawit turun 4,35 persen. Harga bawang putih dan telur ayam ras juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 7,96 persen dan 2,56 persen.

Dengan tren harga yang fluktuatif, Pemkab Tuban bersama TPID terus melakukan pemantauan intensif dan langkah-langkah strategis untuk menekan laju inflasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pelaku usaha, akan dioptimalkan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli Masyarakat.

12.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Tingkat Inflasi Daerah	100	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.771.170,00	460.043.750,00	74,60	15,40
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	521.540.000,00	506.380.831,00		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940,00	2.749.165.781,00		
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790,00	664.974.500,00		
		Program Pengembangan Ekspor	558.669.830,00	530.568.407,00		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	209.199.920,00	206.092.150,00		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	290.297.880,00	288.218.372,00		
		Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	592.000.000,00	464.942.000,00		
		Program Pengembangan UMKM	928.897.690,00	861.729.307,00		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800,00	69.653.500,00		

13. Indeks Desa Membangun (IDM)

13.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

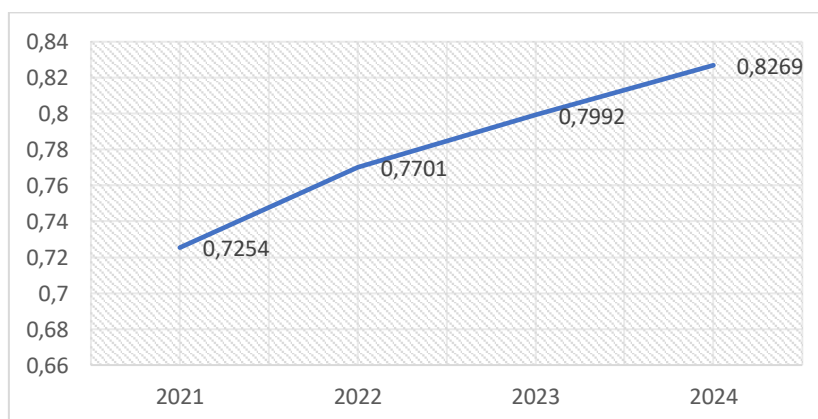
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa



untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada tahun 2024 capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban sudah tercapai target yang diharapkan yakni sebesar 0,8001 dengan realisasi capaian sebesar 0,8269 atau nilai capaian kinerja 105,22%.

13.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 3.15 Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Dari grafik diatas dapat dilihat Indeks Desa Membangun (IDM) terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan realisasi 0,7254 hingga tahun 2024 dengan realisasi 0,8269.

13.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tingkat Inflasi Daerah sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Capaian Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban tahun 2024 1,51% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 1-2% sudah terncapai 100%.

13.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Indeks desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.36 Perbandingan Indeks desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8269	0,8412	0,8155

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupeten Tuban lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten Lamongan dan tidak terpaut jauh dari Kab. Bojonegoro. Sejak tahun 2011 dari 311 desa di Kabupaten Tuban, yang masuk kategori Desa Berkembang sebanyak 136 desa, Desa Maju 151 Desa dan Desa Mandiri 24 desa. Tahun 2024 untuk Desa Berkembang tinggal 44 desa, sisa 194 desa menjadi Desa Maju. Begitu juga Desa Maju, dari 151 desa sekarang menjadi 194 desa, dan Desa Mandiri, tahun ini 73 desa dari sebelumnya 24 desa. IDM Kabupaten Tuban masuk dalam terbaik Nasional Peringkat ke-49.

13.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Pesatnya perkembangan desa-desa di Kabupaten Tuban dikarenakan banyak kepala desa (kades) yang terbuka atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan peningkatan kapasitas desa di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan ekologi, Peningkatan kapasitas tersebut sesuai dengan kriteria dalam penilaian IDM. Beberapa upaya yang telah dilakukan :

- Meningkatnya kapasitas desa di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan ekologi.

- b. Meningkatnya kompetensi perangkat/aparatur desa serta meningkatnya persentase desa mandiri dari 311 desa di Kabupaten Tuban yang telah mencapai status desa mandiri sebanyak 73 desa.

13.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Desa Membangun (IDM)	105,22	Program Penataan Desa	98.086.000,00	68.532.000,00	71,60	33,62
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	118.731.600,00	81.531.500,00		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083,00	8.015.386.917,00		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220,00	1.243.494.790,00		
		Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170,00	735.992.450,00		
		Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717,00	1.693.773.850,00		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.770.445.390,00	9.809.976.800,00		
		Program Penanganan Bencana	788.878.550,00	743.041.000,00		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546,00	86.006.100,00		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.432.440,00	78.354.000,00		

14. PDRB Per kapita

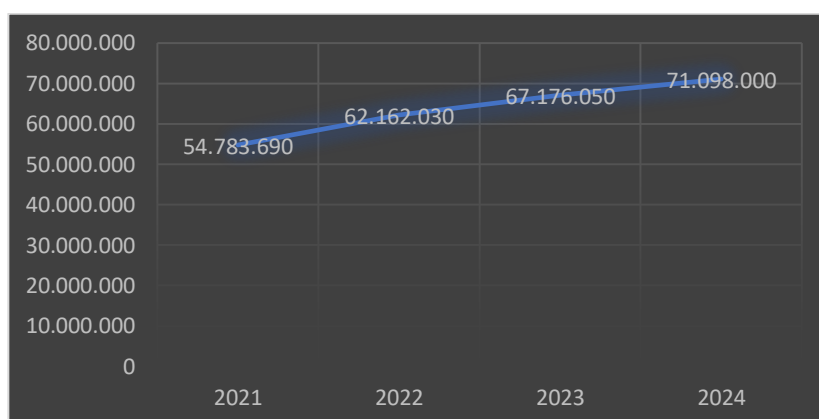
14.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Pada tahun 2024 capaian PDRB Per kapita Kabupaten Tuban tidak menrcapai target yang diharapkan yakni sebesar 57.180.000 dengan realisasi capaian sebesar 71.098.000 atau nilai capaian kinerja 124,34%.

14.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan dengan capaian selama beberapa tahun terakhir, capaian PDRB Per-kapita Kabupaten Tuban mengalami tren kenaikan dari beberapa tahun terakhir.

Grafik 3.16 Perkembangan PDRB Per-kapita Kabupaten Tuban Beberapa Tahun Terakhir

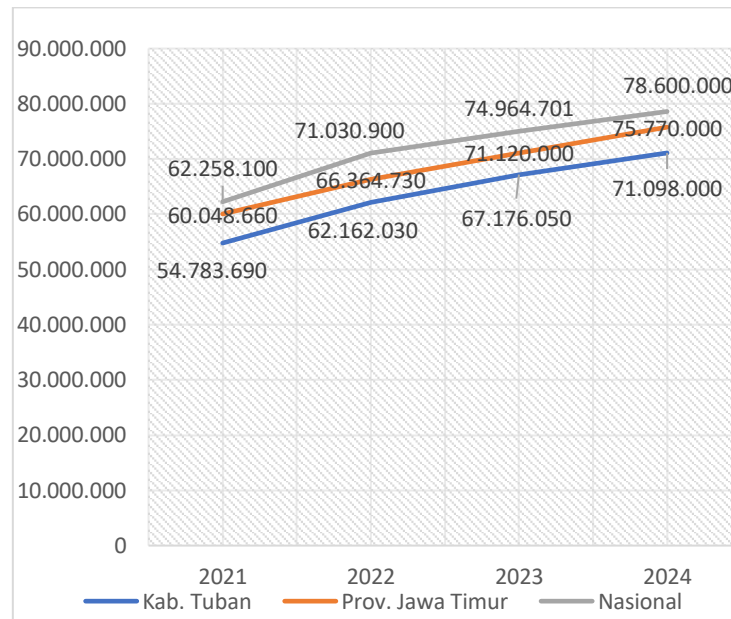


14.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan capaian tahun ini Rp. 71.098.000 dengan target akhir RPJMD Rp. 59.450.000,- maka prosentase capaian sebesar 119%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD sudah terlampaui dan diperlukan penyesuaian target untuk tahun berikutnya.

14.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Grafik 3.17 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional



14.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
PDRB Per Kapita	124,34	Program Penataan Desa	98086000	68532000	71.60	52,73
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	118731600	81531500		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8777999083	8015386917		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1407219220	1243494790		
		Program Pemberdayaan Sosial	905878170	735992450		
		Program Rehabilitasi Sosial	7469641717	1693773850		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11770445390	9809976800		
		Program Penanganan Bencana	788878550	743041000		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86820546	86006100		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78432440	78354000		

15. Persentase Peningkatan Nilai Investasi

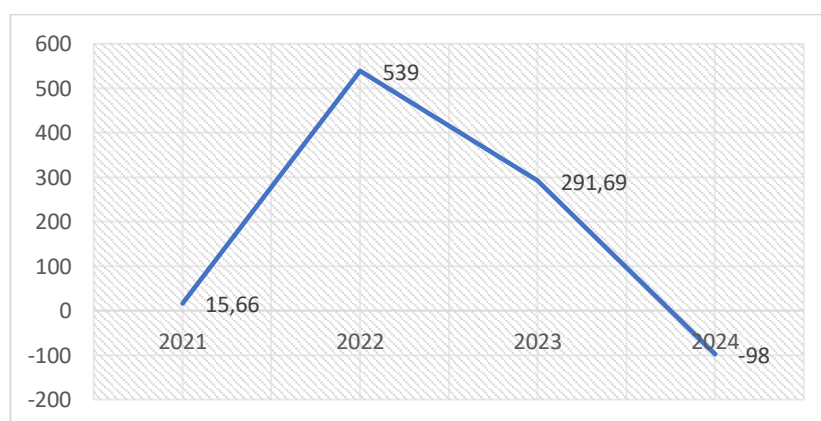
15.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Pada tahun 2024 capaian Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten Tuban tidak menrcapai target yang diharapkan yakni sebesar 3,5% dengan realisasi capaian sebesar -98 atau nilai capaian kinerja -2800%.

15.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan dengan capaian Persentase Peningkatan Nilai Investasi tahun kemarin, capaian Persentase Peningkatan Nilai Investasi tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 3.18 Perkembangan Peningkatan Nilai Investasi Selama Beberapa Tahun Terakhir



15.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian Persentase Peningkatan Nilai Investasi belum memenuhi target akhir RPJMD, target akhir RPJMD 3,5% sedangkan capaian tahun 2024 adalah -98% persentase capaian sebesar -2800%. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang signifikan untuk bisa mencapai target di akhir RPJMD.

15.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan Provinsi dapat dan Nasional dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.36 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten Tuban dengan

Provinsi dan Nasional Tahun 2024

	Kab. Tuban	Prov. Jawa Timur	Nasional
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	-98	1,5	22,1

10.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Nilai Investasi by pemohon kabupaten Tuban Tahun 2024 sebesar Rp.8.282.287.373.462; berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi OSS pada tanggal 31 Desember 2024. Sedangkan pada tahun 2023 Nilai investasi di Kabupaten Tuban sebesar Rp. 413.633.274.883.449; hal ini berarti jika dibandingkan dengan Tahun 2023 nilai investasi pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.395.350.987.509.987; penurunan yang signifikan ini dikarenakan pada tahun 2024 Perusahaan besar yang akan berinvestasi di kabupaten Tuban yaitu Perusahaan Kilang Minyak Internasional telah mendaftarkan perusahaannya melalui aplikasi OSS dengan mencatatkan nilai investasi dua kali sebesar Rp. 202.743.858.519.600; dengan KBLI yang berbeda sehingga diperoleh data modal awal perusahaan kilang minyak Internasioanl sebesar 405.487.717.039.200; sedangkan pada tahun 2024 perusahaan besar yang mendaftarkan perusahaannya adalah Pertamina EP dengan investasinya sebesar Rp. 2.406.075.300.000,-. Berdasarkan target nilai investasi yang tercantum pada RPJMD dan RKPD Tahun 2024 sebesar 3,5%, maka didapatkan penurunan Realisasi pada indikator persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2024 adalah sebesar -98 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,5% dan persentase tingkat capaian antara realisasi dan target yaitu sebesar -28 % Jika dihitung Peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas, maka dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 8.282.287.373.462 (n)} - \text{Rp. 413.633.274.883.449 (n-1)}}{\text{Rp. 413.633.274.883.449 (n-1)}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 sebesar -98 %. sedangkan Target Peningkatan nilai

Investasi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 adalah sebesar 3,5%, sehingga capaian kinerja Peningkatan Nilai Investasi di kabupaten Tuban pada Tahun 2024 sebesar -28%.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan dan Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan anggaran DAK Non Fisik;
- 2) Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 3) Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM;
- 4) Memberikan Edukasi dan sosialisasi LKPM kepada seluruh pelaku usaha;
- 5) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Propinsi;
- 6) Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, one-one meeting, dan lainnya;
- 7) Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha;
- 8) Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi ;
- 9) Membuat Aplikasi TOSS (Tuban online single submission), untuk kemudahan proses perizinan bagi masyarakat;
- 10) Menerapkan inovasi jempol lari (jemput bola pelayanan perizinan) di desa dan kecamatan yang jauh dari kota dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan;
- 11) Menerapkan inovasi jempol Ananda (jemput bola penyampaian LKPM) pendampingan dan fasilitasi ke pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM;
- 12) Menerapkan inovasi Pendekar (pengiriman dokumen kami antar) salah satu bentuk kompensasi dari DPMPSTP jika terjadi keterlambatan dan proses pembuatan dokumen perizinan, dokumen akan langsung disampaikan ke rumah pemohon melalui jasa kurir ID Exspres secara GRATIS, dan juga sebaliknya apa bila tidak terjadi keterlambatan pemohon bisa menggunakan fasilitas ini dengan biaya 4.500 pengantaran ke seluruh kabupaten Tuban;

- 13) Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015;
- 14) Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku;
- 15) Reward petugas pelayanan terbaik;
- 16) Tersedianya Help Desk;
- 17) Tersedianya Investment lounge yang menyediakan informasi dan layanan untuk investor.

Alternatif solusi atas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan:

- 1) Lebih insentif didalam pendampingan, fasilitasi dan pengawasan penyampaian LKPM ke pelaku usaha khususnya yang skala kecil dan menengah;
- 2) Mendorong percepatan realisasi investasi ke pelaku usaha (PMA);
- 3) Evaluasi Pelaksanaan pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal;
- 4) Penyediaan Peta Potensi sektor pertanian dan Peluang Usaha;
- 5) Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan OSS RBA;
- 6) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
- 7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

15.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

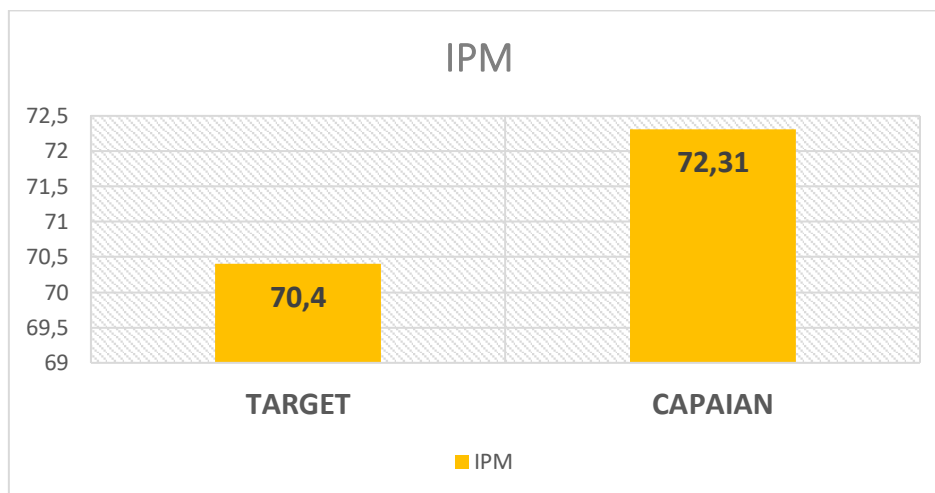
INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Persentase peningkatan nilai investasi	-2800	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352350000	351163432	96,92	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	506199600	447132277		
		Program Promosi Penanaman Modal	540000000	539100099		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254294400	251406381		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458147000	457209912		

16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

16.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 mencapai 72,31, sedangkan targetnya adalah sebesar 70,4 dengan persentase capaian sebesar 102,71%.

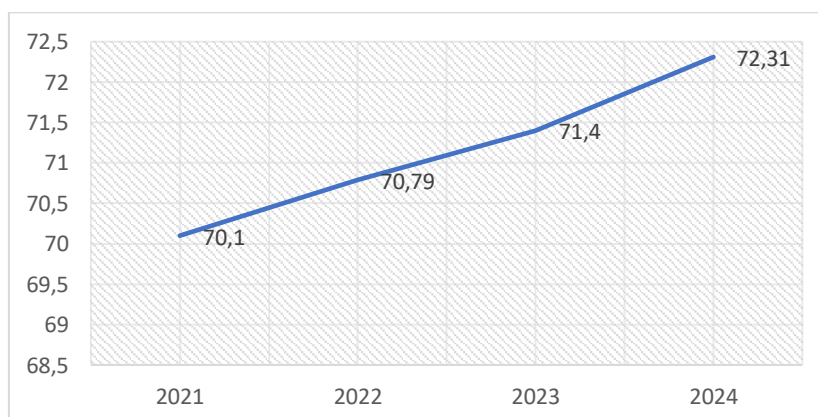
Grafik 3.19 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS adalah pengukuran capaian

16.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan capaian IPM selama beberapa tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.



Grafik 3.20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 - 2024

Selama 4 tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata 0,58 poin per tahun. Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya 71,4 menjadi 72,31 di Tahun 2024.

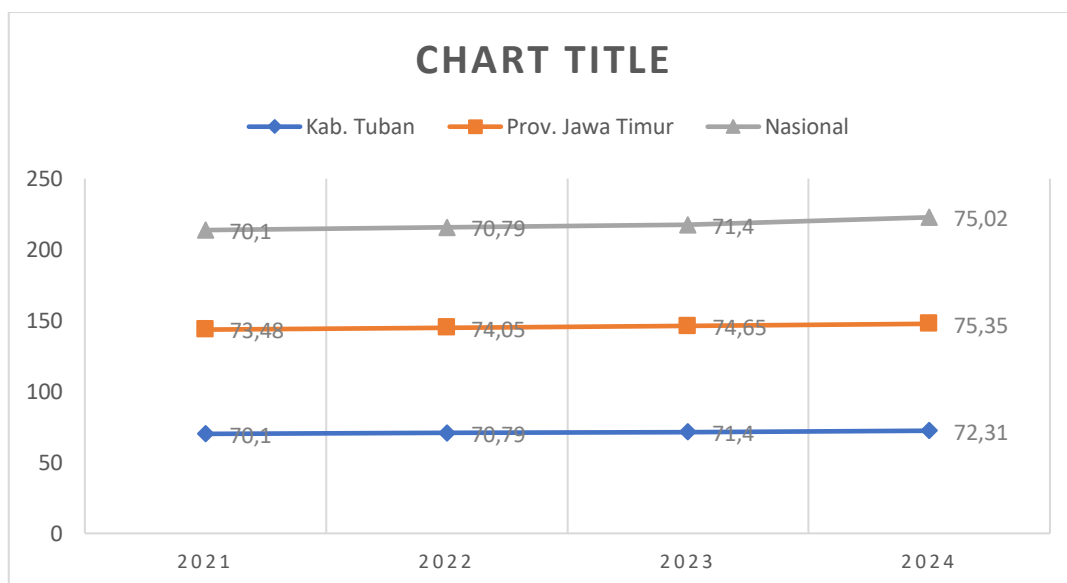
16.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Capaian nilai IPM Kabupaten Tuban tahun 2024 (72,31) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (71,8) sudah mencapai 100,85%.

16.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Tuban masih berada di tingkat paling bawah. Nilai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban yaitu 71,4 termasuk dalam kategori tinggi.

Grafik 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional



16.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Analisis relevansi dan efektivitas penting dilakukan untuk menilai seberapa jauh program peningkatan IPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mendukung sasaran nasional. Apabila pola tren suatu indikator pemerintah kabupaten/kota sejalan dengan

indikator provinsi dan nasional dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut telah mendukung sasaran nasional.

Grafik diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, kecenderungan tren IPM di Kabupaten Tuban sejalan atau relevan dengan kecenderungan tren IPM di tingkat provinsi maupun nasional, yaitu memiliki tren naik. Dengan kata lain selama periode tersebut upaya peningkatan IPM di Kabupaten Tuban sejalan/relevan untuk mendukung tujuan provinsi dan nasional.

Perlu adanya perbaikan yang signifikan mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Tuban. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan meningkatkan tiga komponen pembentuk IPM, yaitu indikator kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

16.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	102,71	Program Pengelolaan Pendidikan	270.983.041.191,00	225.731.470.947,15	87,74	14,96
		Program Pengembangan Kurikulum	227.454.000,00	196.491.250,00		
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	32.966.670,00	15.544.500,00		
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.980.498.510,00	1.956.585.260,00		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.491.855.325,00	87.377.046.607,00		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	471.175.730,00	391.775.918,00		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	2.464.614.630,00	2.131.405.826,00		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	379.657.750,00	342.906.050,00		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.170.025.000,00	6.965.399.513,00		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.258.309.000,00	6.146.551.809,00		
		Program Pengendalian Penduduk	519.700.500,00	482.695.780,00		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	6.920.579.510,00	6.883.602.640,00		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	164.948.200,00	164.084.170,00		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	129.008.670,00	125.495.860,00		

		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	490.968.430,00	430.631.400,00		
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	514.610.800,00	493.174.846,00		
		Program Perlindungan Perempuan	131.451.760,00	77.954.985,00		
		Program peningkatan kualitas keluarga	65.502.200,00	57.910.000,00		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	115.612.630,00	98.809.000,00		
		Program Perlindungan Khusus Anak	150.964.900,00	87.658.200,00		

17. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

17.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini Indeks Literasi Kabupaten Tuban tahun 2024 mencapai 11,82 dan target kinerjanya adalah sebesar 10,5 jadi persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 112,57.

17.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi indeks pembangunan literasi masyarakat pada Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah sebesar 11,82, sedangkan pada tahun 2022 adalah 11,319. Akan tetapi angka ini kemudian dikonversi dengan dibagi 4,76 sehingga IPLM nya menjadi 11,319.

Grafik 2.22 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 – 2024



17.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan capaian IPLM tahun 2024 yaitu sebesar 11,82 sedangkan target akhir RPJMD adalah sebesar 10,9 dengan persentase capaian kinerja adalah sebesar 108,79%. Hal ini menunjukkan bahwa target IPLM kedepan sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian target kinerja.

17.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Nilai IPLM berada pada selang 0-100, namun demikian pada pembahasan tentang target Renstra Perpustnas digunakan selang 0-20 yang menyesuaikan dengan target tersebut. Jika nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai Renstra Perpustnas, maka hasil IPLM harus dikonversi

dengan angka 4,76. Untuk realisasi IPLM pada tingkat provinsi Jawa Timur adalah sebesar 78,60 yang dikonversi sehingga menjadi 16,512 dan masuk dalam kategori tinggi. Untuk nilai IPLM Nasional pada tahun 2024 sebesar 73,52 yang sudah masuk kategori sedang, setelah dikonversi angka tersebut menjadi 15,445 artinya secara nasional nilai IPLM tahun 2024 sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan Perpusnas.

Tabel 3.16 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Pemprov Jatim	Nasional
IPLM	11,822	12,075	16,512	15,445

17.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sesuai dengan target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Tuban telah berjalan dengan baik sesuai rencana.
2. Pembudayaan Gemar Membaca hingga anak usia dini di Kabupaten Tuban
3. Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis Kabupaten Tuban
4. Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Tuban hingga di tempat-tempat wisata dan ruang terbuka
5. Optimalisasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten Tuban

17.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

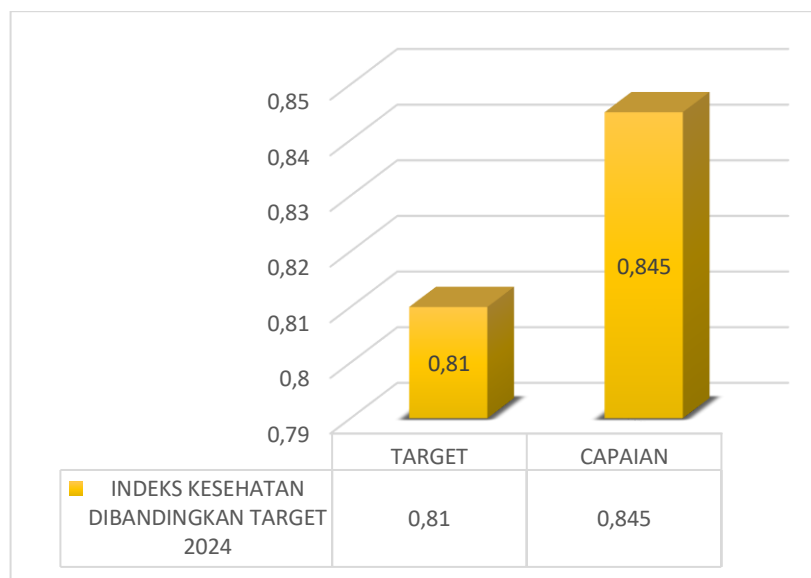
Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
IPLM	112,57	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	46.000.000,00	45.366.290,00	98,07	14,50
		Program Pengelolaan Arsip	634.290.920,00	621.785.304,00		

18. Indeks Kesehatan

18.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

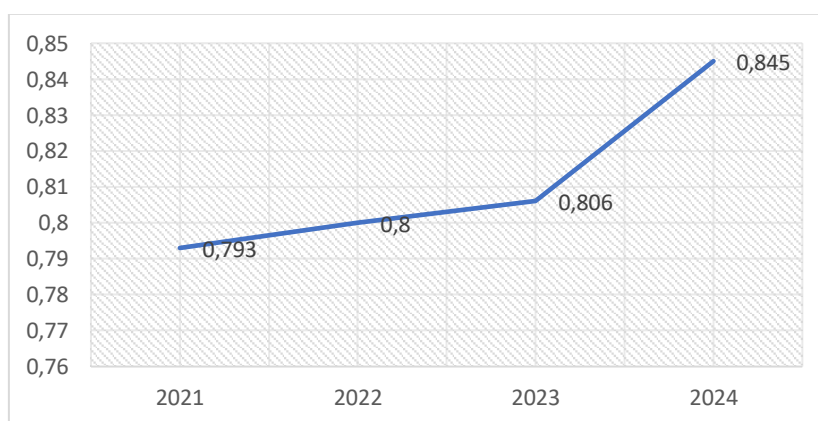
Capaian Indeks Kesehatan tahun 2024 adalah sebesar 0,845, dengan target yaitu 0,805 sehingga persentase capaian adalah sebesar 104,32.

Grafik 3.23 Capaian Indeks Kesehatan Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



18.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan capaian Indeks Kesehatan selama beberapa tahun terakhir nilai IKP Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.



Grafik 3.24 Indeks Kesehatan di Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024

Selama 4 tahun terakhir, capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya 0,806 menjadi 0,845 di Tahun 2024.

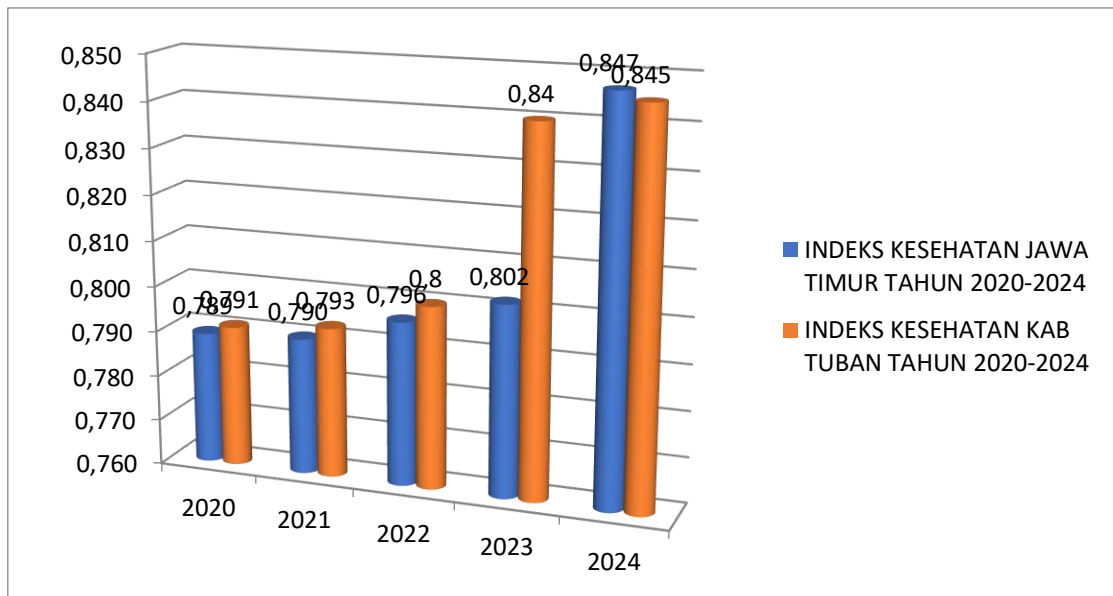
18.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Jika dibandingkan Capaian Indeks Kesehatan Tahun 2024 (0,845), dibandingkan dengan target akhir RPJMD (0,81), persentase capaian kinerja sudah mencapai 104,32%. Hal ini menunjukkan bahwa target Indeks Kesehatan kedepan sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian target kinerja.

18.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Jika dibandingkan dengan Capaian Indeks Kesehatan Jawa Timur, Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban di tahun 2024 berada sedikit dibawah capaian Indeks Kesehatan Jawa Timur dengan selisih angka 0,002.

Grafik 3.25 Perbandingan Capaian Indeks Kesehatan
dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024



18.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

A. PENYEBAB KEBERHASILAN/KETIDAKBERHASILAN KINERJA

1. Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat dengan indikator angka harapan hidup target 75 tahun masih belum tercapai dimana berdasarkan sumber data umur

harapan hidup saat lahir menggunakan hasil proyeksi penduduk LF SP2020 bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,95 tahun, namun demikian meningkat 0,18 tahun dibandingkan



dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Meningkatnya harapan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi kesehatan seperti kematian bayi pada tahun 2024 sebesar 6,91/1000 kelahiran hidup, faktor penyakit Menular yaitu capaian orang dengan terduga TBC mendapat pelayanan sesuai standar sebesar 119,49% capaian pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini sesuai standar sebesar 158,99%, faktor penyakit tidak menular diantaranya capaian pelayanan orang dengan Diabetes Mellitus mendapat pelayanan sesuai standar 100%, capaian pelayanan orang dengan Hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar 98,41 %, selain itu juga karena adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dimana Puskesmas Puskesmas dengan Kinerja Baik 96,97% dan peningkatan sanitasi terkait akses jamban sehat sudah 100%.

2. Persentase Balita Stunting tahun 2024 berdasarkan bulan timbang sebesar 8,38% dari target renstra sebesar 14%. sedangkan hasil SSGI Tahun 2024 belum dirilis (Hasil SSGI tahun 2023 sebesar 17,8%). Penyebab masih adanya kasus stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah masih banyaknya kasus anemia pada Remaja Putri, Calon Pengantin (Catin) KEK dan Anemia, Ibu Hamil KEK dan Ibu hamil Anemia, pola asuh pada balita yang belum sesuai dengan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) dan masih adanya Balita dengan masalah gizi (Gizi buruk, gizi kurang, Berat Badan Kurang, Berat Badan tidak naik/tetap). Upaya yang sudah dilakukan adalah Intervensi dari hulu sampai ke hilir, antara lain skrining anemia pada Remaja Putri (Rematri), Pemberian tablet tambah darah pada Rematri, skrining pada Calon Pengantin (Catin), Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Catin yang anemia, Pemberian TTD bagi Ibu hamil, Pemberian PMT bagi Bumil KEK,

Pemberian PMT pada Balita bermasalah Gizi. Pemberian Edukasi PMBA bagi Ibu Balita di Posyandu, Edukasi Pada Ibu Balita/keluarga melalui Kelas Ibu hamil, Kelas Ibu Balita, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Media Online. Konvergensi Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting dengan lintas Program dan lintas sektor terkait.

3. Penurunan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan SPM kesehatan.

Tercapainya beberapa Indikator SPM Kesehatan tercapai 100 % yaitu

- a. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - b. Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
 - c. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
4. Peningkatan jumlah desa ODF di Kabupaten Tuban dari 193 menjadi 328 Desa dari 328 desa dan 100 % sudah ODF tahun 2023

B. UPAYA NYATA DAN/ATAU HAMBATANNYA ATAS PENCAPAIAN KINERJA

1. Upaya yang telah dilakukan dalam penurunan kematian ibu, bayi dan balita dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) pendampingan Bumil Resti oleh kader
- 2) ANC terpadu di Puskesmas
- 3) pendampingan Bumil Resti di Puskesmas oleh Dokter SpOG dan Dokter Sp.Pd
- 4) Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) bagi Bumil resti/Ibu nifas.
- 5) Edukasi kepada Ibu hamil dan keluarga melalui Kelas Ibu Hamil dan media online.
- 6) Koordinasi dengan Bidang terkait dengan Penanganan Ibu hamil tentang Penyakit Tidak Menular (PTM)/Penyakit Menular (PM).
- 7) pendampingan Bumil Resti oleh kader,
- 8) ANC terpadu di Puskesmas,
- 9) pendampingan Bumil Resti di Puskesmas oleh Dokter SpOG dan Dokter Sp.Pd,
- 10) Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) bagi Ibu nifas yg menunggu bayinya dalam perawatan di RS.

- 11) Edukasi kepada Ibu balita melalui kelas Ibu hamil, Kelas Ibu Balita dan Media Online.
2. Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan stunting di Kabupaten Tuban dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
- Intervensi dari hulu sampai ke hilir, antara lain:
- 1) Skrening anemia pada Remaja Putri (Rematri),
 - 2) Pemberian tablet tambah darah pada Rematri,
 - 3) skrening pada Catin,
 - 4) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Catin yang anemia,
 - 5) Pemberian TTD bagi Ibu hamil,
 - 6) Pemberian PMT bagi Bumil KEK,
 - 7) Pemberian PMT pada Balita bermasalah Gizi. Pemberian Edukasi PMBA bagi Ibu Balita di Posyandu.
 - 8) Edukasi pada Ibu Balita dan keluarga melalui kelas Ibu hamil, Kelas Ibu balita, SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) dan media online.
 - 9) Konvergensi Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
3. Upaya bidang pengendalian penyakit dalam Penurunan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan melaksanakan gebyar Posbindu PT dan TM di masyarakat secara berkala. Ada beberapa indikator SPM yang belum 100 % yaitu
1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
 2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
 3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
 5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
 6. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 7. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
9. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Upaya dalam rangka meningkatkan capaian tahun yang akan datang adalah dengan meningkatkan pelayanan, sarana prasarana untuk pemeriksaan dan pelayanan ibu, balita, lansia, ODGJ, PUS melalui dana dari Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas

4. Upaya dalam rangka penurunan kematian Ibu dan bayi dalah satunya adalah peningkatan kualitas dan akses sanitasi dengan upaya yang telah dilakukan yaitu dengan pembinaan desa STBM dan pembinaan Kabupaten Sehat.
5. Upaya yang dilakukan bidang Keluarga Berencana adalah dengan penundaan usia perkawinan <20 tahun dengan cara Pembinaan BKR (Bina Keluarga Remaja), Pembinaan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), Penyuluhan Kespro Remajadan Minilokakarya bersama Tim Kab dan Tim kecamatan belum memberikan dampak signifikan terhadap kejadian penundaan usia perkawinan dini. Dengan adanya peningkatan jumlah pernikahan dini diperlukan.

18.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Kesehatan	104,32	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22750195709	22094322665	96,35	7,96
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	471175730	391775918		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	2464614630	2131405826		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	379657750	342906050		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7170025000	6965399513		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks)	6258309000	6146551809		
		Program Pengendalian Penduduk	519700500	482695780		

19. Indeks Ketahanan Pangan

19.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, produksi padi Kabupaten Tuban di tahun 2024 mencapai 661.292 ton, dengan luas tanam mencapai 107.310. Untuk luas panen mencapai 106.341 hektare, dan provitas mencapai 62,19 kw/ ha. Untuk jagung, produksi mencapai 774.322 ton, dengan luas tanam 137.128 hektare, luas panen 137.121 hektare dengan provitas 56,47 kw/ha. Ketahanan pangan juga didukung dari sektor lain seperti peternakan.

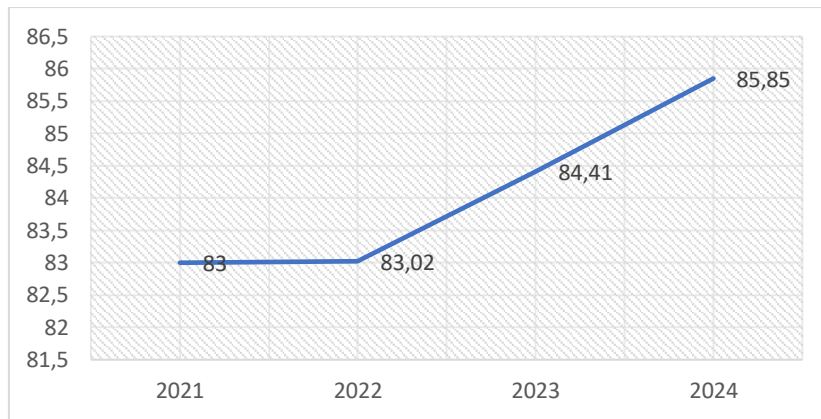


Saat ini, Kabupaten Tuban masih menjadi daerah dengan jumlah populasi terbesar kedua di Jawa Timur. Populasi ternak di Kabupaten Tuban tahun 2022, untuk sapi potong mencapai 274.629 ekor, sapi perah 31 ekor, kambing potong mencapai 128.657, domba 91.717 ekor. Unggas 13.111.700 ekor, terdiri dari ayam kampung 1.596.541 ekor, itik atau bebek 166.454 ekor, mentok 158.810 ekor, dan ayam ras petelur 668.559 ekor. Sebagai daerah yang memiliki garis pantai mencapai 66 km, hasil perikanan laut Kabupaten Tuban juga menjadi salah satu penguat ketahanan pangan serta penggerak roda ekonomi vital. Untuk perikanan, dengan jumlah nelayan laut maupun perairan umum daratan mencapai 10.492 orang, jumlah produksi di tahun 2022 mencapai 33.170,25 ton.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah sebesar 85,85 dengan target yaitu 89 sehingga persentase capaian adalah sebesar 96,46% (Sangat Baik).

19.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan capaian Indeks Ketahanan Pangan selama beberapa tahun terakhir nilai IKP Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.



Grafik 3.26 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024

Selama 4 tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 IKP Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya 84,41 menjadi 85,85 di Tahun 2024.

19.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Jika dibandingkan Capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 (85,85), dibandingkan dengan target akhir RPJMD (91), persentase capaian kinerja sudah mencapai 92,55%.

19.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 3.17 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	85,85	87,63	90,30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tuban lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro.

19.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Hasil analisis berdasarkan indeks komposit menunjukkan bahwa tidak ada satupun desa/kelurahan di Kabupaten Tuban yang termasuk dalam kategori rawan. Sementara itu berdasarkan hasil analisis pada Aspek Ketersediaan Pangan menunjukkan bahwa terdapat 19 desa yang termasuk dalam kategori agak rawan, 6 desa yang termasuk dalam kategori rawan.

Pada Aspek Penyerapan Pangan terdapat 29 desa dalam kondisi agak rawan, dan 9 desa dalam kondisi rawan. Adapun berdasarkan Aspek Penyerapan Pangan terdapat 7 desa dalam kondisi agak rawan, dan 1 desa dalam kondisi rawan. Hal yang menjadi penyebab terjadinya kerawanan pangan dari aspek ketersediaan pangan adalah tingginya persentase lahan tidak beririgasi, dari aspek akses pangan adalah tingginya angka kemiskinan dan pada penyerapan pangan adalah masih ditemukannya kasus kematian bayi.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan domestik adalah perlu dilakukan Upaya perbaikan produktivitas lahan dengan memperbaiki infrastruktur irigasi. Merujuk pada hasil penelitian dimana kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab kerawanan pangan, maka program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah Kabupaten Tuban harus ditingkatkan. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta edukasi kepada ibu hamil perlu dilakukan untuk mengurangi kasus bayi mati.

19.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

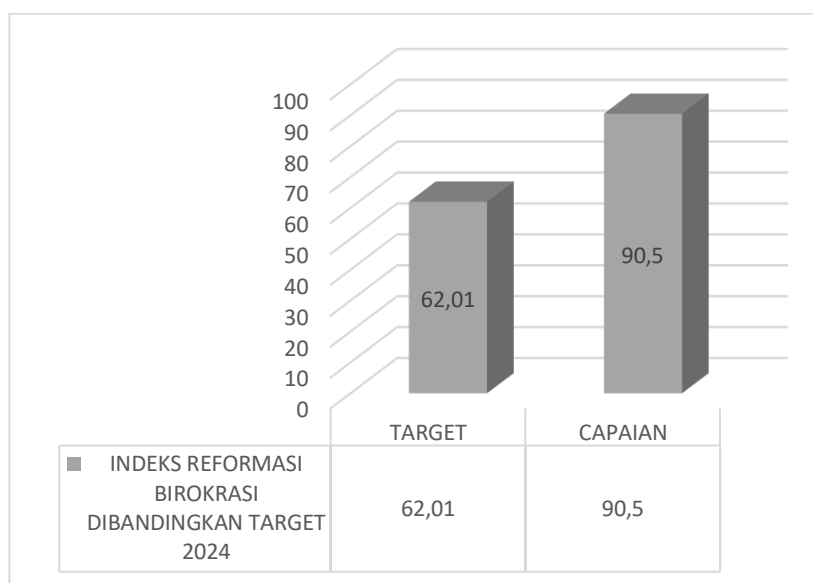
Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	96,46	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0	0	99,42	-2,96
		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	6.920.579.510,00	6.883.602.640,00		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	164.948.200,00	164.084.170,00		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	129.008.670,00	125.495.860,00		

20. Indeks Reformasi Birokrasi

20.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

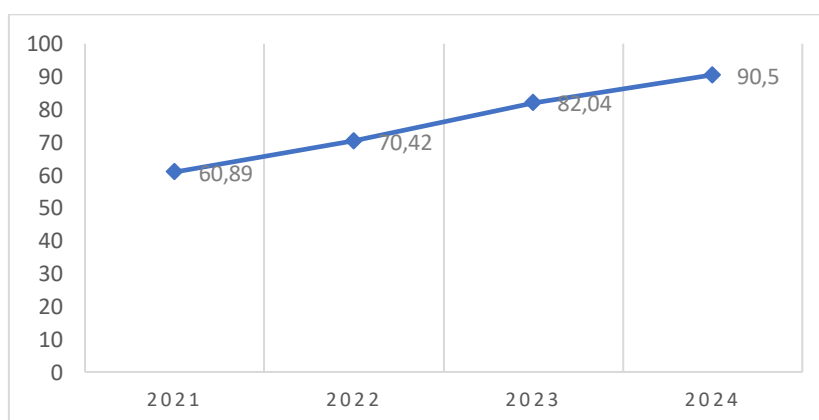
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini Target nilai Indeks RB tahun 2024 adalah sebesar mencapai 62,01 (B), sedangkan nilai indeks RB tahun 2024 adalah 90,5 (A) Jadi persentase capaian kinerja Indeks RB adalah 176%.

Grafik 3.27. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



20.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tuban selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.



Grafik 3.28 Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024

Selama 4 tahun terakhir, capaian IRB Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 IRB Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 82,04 menjadi 90,5 di Tahun 2024.

20.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Jika dibandingkan Capaian . Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 (90,5), dibandingkan dengan target akhir RPJMD (62,84), persentase capaian kinerja sudah mencapai 144%.

20.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Kenaikan nilai RB Kabupaten Tuban di tahun 2024 ini berdasar pada terobosan dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Dua fokus yang dikenal dengan 'double track' ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Reformasi Birokrasi :

- Nilai SAKIP capaian nilai 80.13
- Tingkat Digitalisasi Arsip capaian nilai 89.82
- Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan capaian nilai 5
- Indeks Kualitas Kebijakan capaian nilai 65
- Indeks SPBE capaian nilai 4,24
- Opini BPK capaian nilai 3
- Tingkat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik capaian nilai 99,03

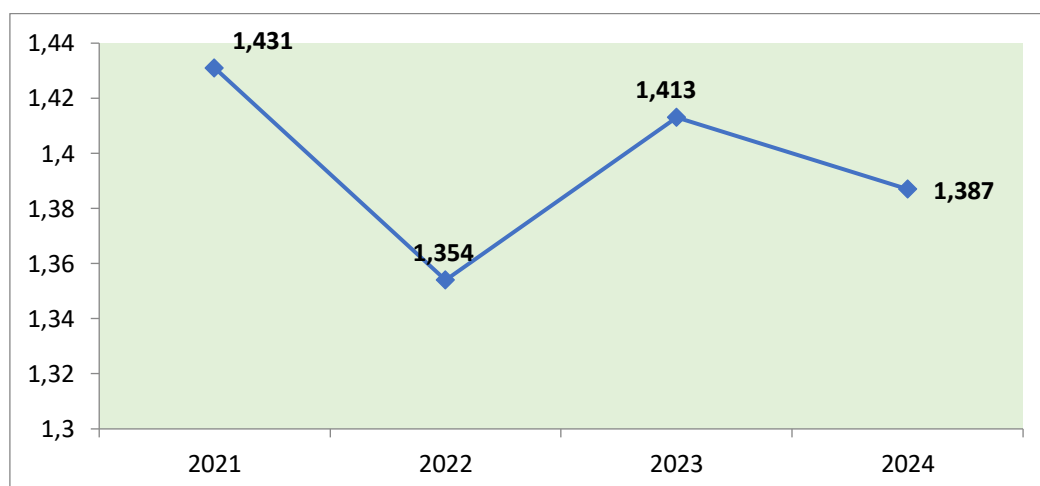
21. Indeks Kapasitas Fiskal

21.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah sebagai unsur dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal daerah yaitu gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Dalam penggunaan peta kapasitas fiskal daerah bisa digunakan dalam 3 kebutuhan yaitu sebagai berikut : pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun capaian Indeks Kapasitas Fiskal tahun 2024 adalah sebesar 1,387 atau mencapai realisasi 81,59% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 1,7.

21.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Grafik 3.29 Perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Tuban mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Pada tahun 2022 angkanya 1,354, sedangkan pada tahun 2024 mencapai angka 1,387, angka ini turun dibandingkan tahun lalu (2023) yang sebesar 1,413.

21.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Jika dibandingkan Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Tahun 2024 yaitu 1,387 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar persentase capaian kinerja sudah mencapai 92,55%.

21.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Pertumbuhan ekonomi belum dicapai secara maksimal, menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Tuban. Namun optimisme masih dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memproyeksikan penambahan pada Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar 3,15% atau Rp.101.328.721.063 menjadi Rp.3.315.409.796.063 dari Rp.3.214.081.075.000. APBD murni 2024 yang dianggarkan sebesar.

Hal ini berasal dari kelompok Pencapaian Asli Daerah (PAD) yang naik Rp.30.926.671.490 atau 4,74% dari target yang dipasang sebelumnya Rp.652.951.078.000 menjadi Rp.683.877.749.490. Peningkatan ini berasal dari peningkatan target Pajak Daerah sebesar 4,67% atau Rp.15.526.000.000, dan Retribusi Daerah naik 1.349,02% atau Rp.284.976.745.004. Kenaikan target retribusi yang sangat signifikan tersebut, dikarenakan adanya peralihan target penerimaan pelayanan kesehatan pada BLUD dari kelompok Lain-lain PAD yang sah ke kelompok Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang SAH menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya sebagai konsekwensi dari peralihan tersebut, pada Perubahan APBD Tahun 2024 kelompok Lain-lain PAD Yang sah mengalami penurunan cukup drastis sebesar (Rp.269.305.107.898) atau turun (96,04%) dari target APBD murni Tahun 2024. Sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga diproyeksikan turun (1,41%) atau (Rp.270.965.616).

Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:

- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.

- (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan IV-2 PERUBAHAN KUA 2024 dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
- (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
- (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

21.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

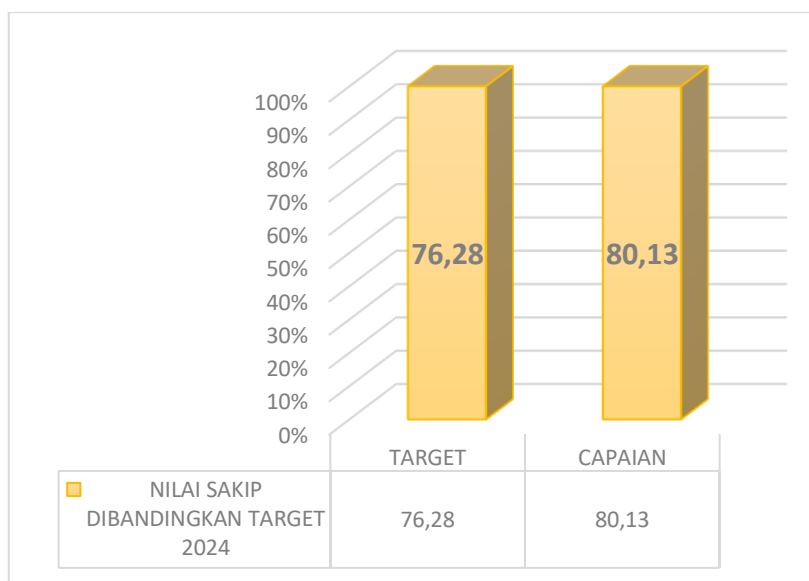
Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Kapasitas Fiskal	81,59	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.403.659.420,00	2.143.022.619,00	87,46	-5,87
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.462.220.291,00	2.392.416.177,00		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.704.200.820,00	4.709.688.406,00		

22. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah

22.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 adalah 80,13 (A), jika dibandingkan dengan target (76,28) maka pencapaiannya mencapai 105,05% termasuk dalam kategori memuaskan.

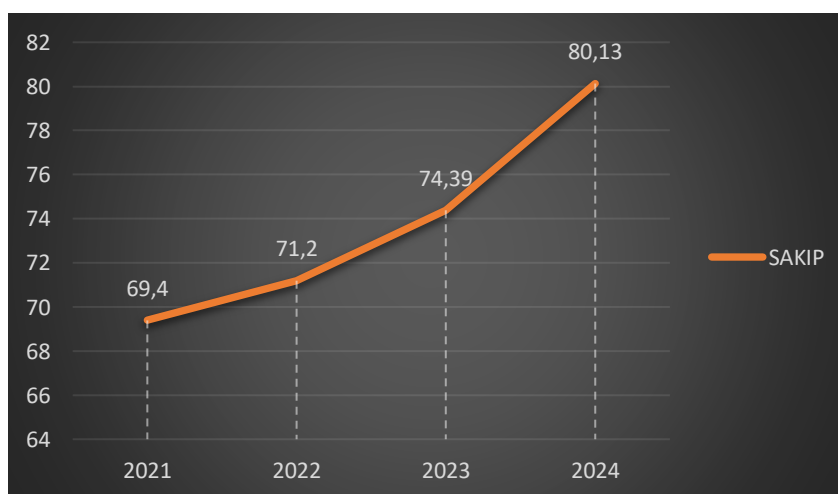
Grafik 3.30 Capaian SAKIP Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



22.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan capaian nilai SAKIP selama beberapa tahun terakhir nilai SAKIP Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.

Grafik 3.31 Perkembangan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024



Selama 4 tahun terakhir, capaian SAKIP Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 SAKIP Kabupaten Tuban mengalami kenaikan predikat dari BB (74,39) di tahun 2023 menjadi A di tahun 2024 dengan nilai 80,13.

22.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Jika dibandingkan Capaian nilai SAKIP Tahun 2024 yaitu 80,13 dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 80,15 persentase capaian kinerja sudah mencapai 99,97%.

22.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Jika dibandingkan dengan capaian SAKIP daerah sekitar, capaian SAKIP Kabupaten Tuban termasuk dalam kategori tertinggi karena termasuk 8 (delapan) kab/kota yang berpredikat A di Jawa Timur. Kabupaten Tuban mempunyai urutan ke 10 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 3.17 Perbandingan Nilai Sakip dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Timur

<i>Nama Daerah</i>	Nilai Sakip Tahun 2024	Predikat
<i>Pemprov Jatim</i>	84,19	A
<i>Kab. Tuban</i>	80,13	A
<i>Kab. Lamongan</i>	83,18	A
<i>Kab. Bojonegoro</i>	74,02	BB
<i>Kab. Jombang</i>	72,33	BB
<i>Kab. Nganjuk</i>	70,07	BB

22.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian nilai SAKIP Tahun 2024 tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang terus berupaya untuk memperbaiki sistem tata Kelola Pemerintah Daerah salah satunya dengan pengembangan Aplikasi E-Dalev yang mengintegrasikan beberapa Aplikasi seperti SIRUP (Aplikasi dari PBJ), Siteman (Aplikasi dari BKPSDM) dan Simanisku (Aplikasi dari Bagian Organisasi). Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama Kabupaten Tuban. Berbagai strategi dalam menurunkan tingkat kemiskinan masif dilakukan, seperti menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalisasi atau mengurangi kantong-kantong kemiskinan telah dilakukan.

Untuk meningkatkan capaian nilai SAKIP kedepan diperlukan suatu sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi dengan Manajemen Resiko serta pemahaman seluruh Perangkat Daerah baik pimpinan maupun pegawainya terkait dengan implementasi SAKIP.

22.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

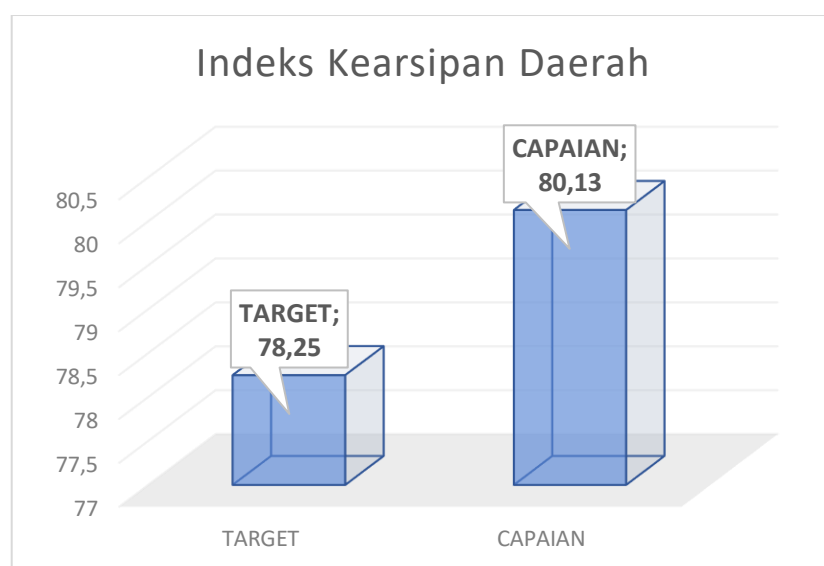
Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Nilai SAKIP	105,05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KoTa	10.214.365.489,00	9.583.659.243,00	94,58	10,47
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.645.619.704,00	3.613.335.377,00		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.535.784.120,00	2.453.582.026,00		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.886.199.157,00	1.640.884.182,00		
		Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi	10.214.365.489,00	9.583.659.243,00		

24. Indeks Kearsipan Daerah

24.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Indeks kearsipan daerah adalah hasil pengawasan terhadap pelaksanaan lembaga kearsipan daerah. Indeks ini diberikan oleh instansi vertikal seperti Disarpus (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Provinsi atau ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 78,25 sedangkan capaian indeks kearsipan tahun 2024 mencapai 80,13 atau sebesar 106,77% melampaui target yang telah ditetapkan.

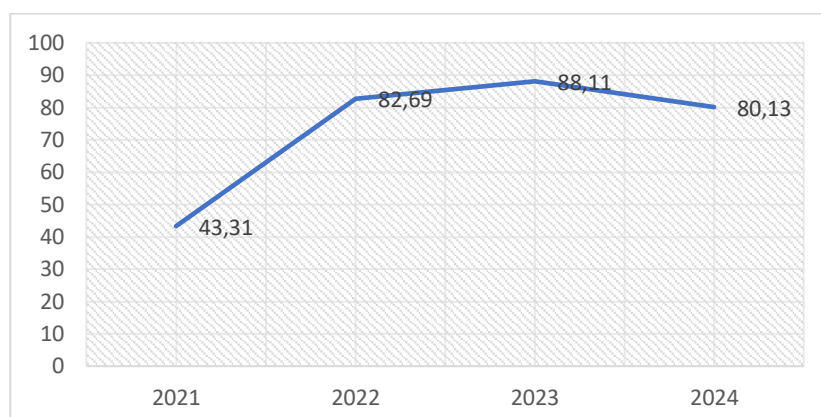
Grafik 3.32 Capaian Indeks Kearsipan Daerah Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



24.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan capaian Indeks Ketahanan Pangan selama beberapa tahun terakhir Indeks Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban cenderung fluktuatif per tahun nya. Capaian Indeks Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban di tahun 2024 (80,13) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 (88,11). Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Indeks Kearsipan Daerah telah melampaui target yang ditetapkan tahun ini.

Grafik 3.33 Indeks Kearsipan Daerah
di Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024



24.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan antara capaian indeks kearsipan tahun 2024 dengan target akhir RPJMD, maka didapatkan bahwa capaian indeks kearsipan sudah melampaui target akhir RPJMD. Dimana capaian tahun 2024 mencapai 80,13, sedangkan target akhir RPJMD adalah sebesar 79, jika dipersentase sebesar 101,40. Sehingga diperlukan penyesuaian target sampai dengan 2026.

24.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban disebabkan oleh implementasi kebijakan kearsipan dan komitmen pimpinan Bupati Tuban sangat berperan dalam pencapaian ini. Selain itu, pengelolaan arsip pada unit pelaksana juga semakin baik, seperti pengelolaan arsip dinamis, transformasi digital, penyusutan arsip terprogram, peningkatan pemanfaatan, dan layanan arsip.

Untuk lebih meningkatkan capaian Indeks Kearsipan Daerah dibutuhkan sistem kearsipan yang lebih terintegrasi, efisien, dan efektif melalui aplikasi yang telah dibangun oleh ANRI, yaitu aplikasi Srikandi.

24.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
	106,77	Program Pengelolaan Arsip	634.290.920,00	621.785.304,00	97,91	8,85

Indeks Kearsipan Daerah		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	134.050.710,00	130.557.148,00		
-------------------------	--	---	----------------	----------------	--	--

25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

25.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan



perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat Memuaskan, Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang. Untuk skala nilai adalah 1-5.

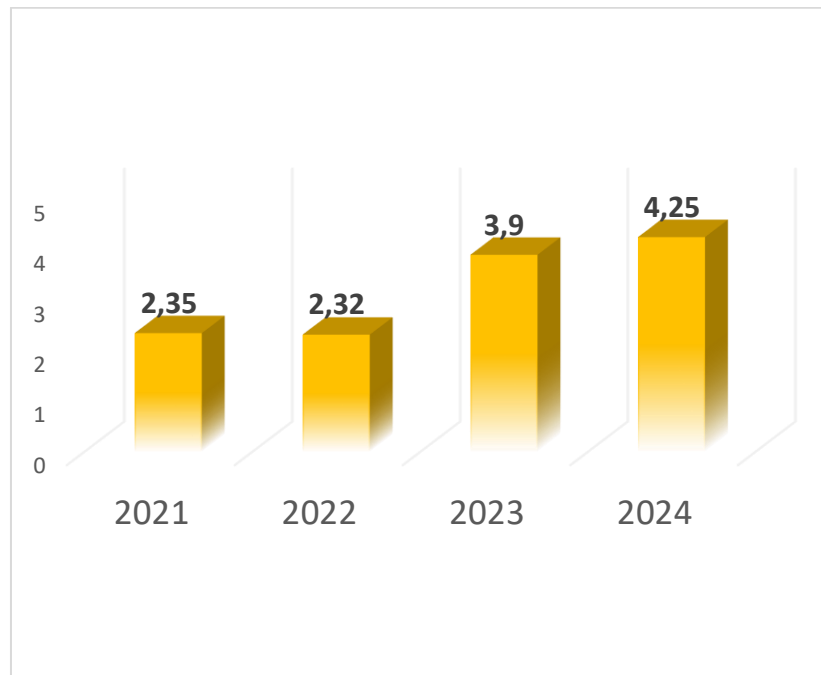
Pemerintah Kabupaten Tuban, berhasil meraih Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 sebesar 4,24 dengan predikat 'Memuaskan'. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.

Sesuai dengan Keputusan MenPAN RB RI nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah tahun 2024. Capaian SPBE tahun 2024 mencapai 4,24 (kategori memuaskan) dengan target sebesar 2,9 sehingga persentase pencapaian sebesar 146,21%.

25.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan nilai SPBE selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.34 Perkembangan Nilai SPBE Tahun 2022-2024



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian SPBE tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin. Di Tahun 2024 ini merupakan capaian tertinggi Kab. Tuban yaitu sebesar 4,25 dengan katagori memuaskan.

25.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (3,3), capaian SPBE tahun 2024 sudah melebihi target (mencapai 128,48%). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian target untuk SPBE di tahun 2025 sampai dengan 2026.

25.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar/ Provinsi/ Nasional

Jika dibandingkan dengan capaian SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur, capaian SPBE Kabupaten Tuban lebih rendah, namun bila dibandingkan dengan nilai SPBE Bojonegoro dan Jombang nilai SPBE Kabupaten Tuban lebih tinggi dan lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Lamongan.

Tabel 3.19 Perbandingan capaian kinerja dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi

Nama Daerah	Nilai SPBE 2024
Pemprov Jawa Timur	4,43
Kabupaten Lamongan	4,24
Kabupaten Tuban	4,18
Kabupaten Bojonegoro	4,14
Kabupaten Jombang	3,91

25.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Proses evaluasi SPBE dilakukan dengan menentukan tingkat kematangan SPBE, dengan mengukur tingkatan penerapan SPBE pada 4 domain yaitu tata kelola, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Terdapat 47 indikator yang dinilai oleh tim evaluator dari pemerintah pusat maupun perguruan tinggi.

Dengan arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang menekankan pentingnya konsistensi, inovasi, dan kolaborasi antar perangkat daerah untuk memastikan pelayanan publik berbasis elektronik dapat semakin optimal. Diantaranya :

- Adanya Kolaborasi dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya di lingkup Internal Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Bimbingan Teknis Tim Koordinasi SPBE, Penyelenggaraan Forum Evaluasi, Pelaksanaan Audit TIK, serta Integrasi berbagai Aplikasi.
- Kolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melalui Asistensi atas Penyelenggaraan SPBE di Daerah.

Diskominfo-SP Tuban selaku leading sector penerapan SPBE mampu mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Diantaranya, meningkatkan integrasi layanan berbasis elektronik antar OPD dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik di Kabupaten Tuban.

25.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	146,21	Program Aplikasi Informatika	5.796.611.234	5.689.094.885	97,91	48,3
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	370.257.150	271.315.486		

Eelektronik (SPBE)		Program Penyelenggaraan Dan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	141.349.970	126.761.380		
--------------------	--	---	-------------	-------------	--	--

26. Indeks Kearsipan Daerah

26.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) tahun 2024 mencapai 81,98 dari target sebesar 64,36 sehingga persentasenya sebesar 127,38%.

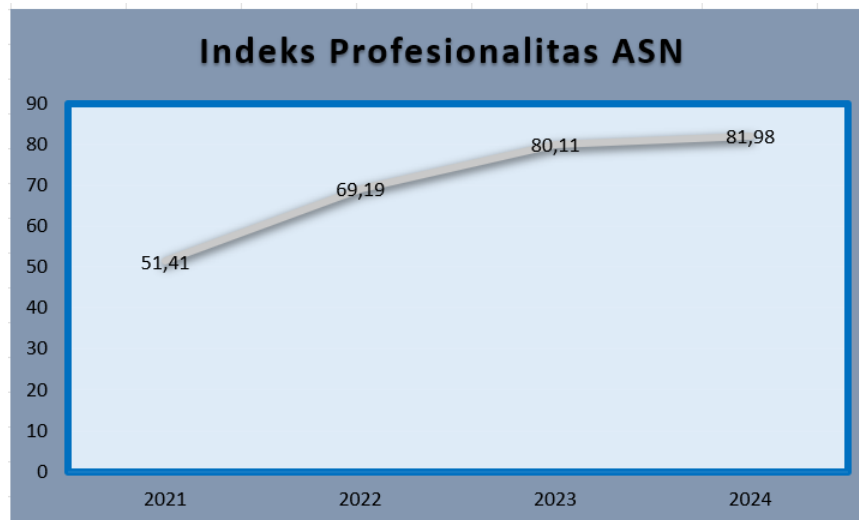
Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi Dimensi Kualifikasi (tingkat pendidikan), Dimensi Kompetensi (Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ Sejenisnya), Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin.

Grafik 3.35 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



26.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 3.36 Perkembangan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban

Indeks profesionalitas ASN mengalami tren naik selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2022 realisasinya adalah 69,19 naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 51,44. Tahun 2023 realisasi sebesar 80,11 dan realisasi pada tahun 2024 mencapai 81,98.

26.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

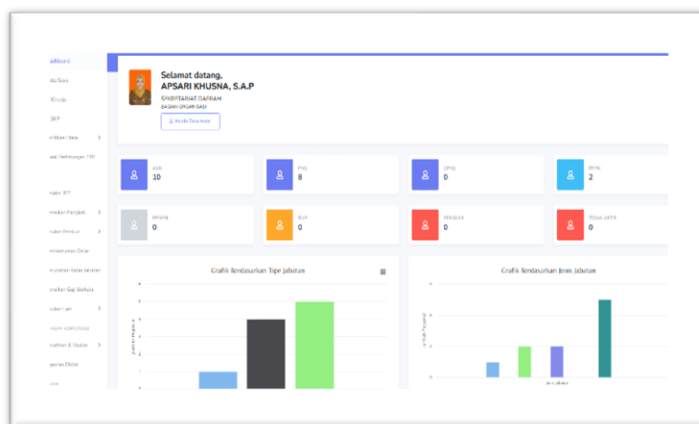
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (69,04), capaian indeks profesionalitas ASN tahun ini sudah mencapai 81,98 dengan persentase sebesar 118,74%, sehingga diperlukan penyesuaian target untuk tahun 2026.

26.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Proses untuk meningkatkan nilai IPASN Tahun 2024 yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tuban yaitu :

1. KUALIFIKASI dalam hal ini pengakuan pendidikan yang dimiliki oleh ASN melalui portal SIASN.
2. KOMPETENSI ditingkatkan dengan 2 cara yaitu melalui ;
 - a) Input mandiri riwayat diklat dan kursus melalui portal MyASN / SITEMAN masing-masing ASN yang telah terintegrasi dengan SIASN.

- Pada portal MyASN masih banyak ASN yang belum mengupdate data khususnya PPPK karena belum memiliki akun. Telah dikomunikasikan untuk pembuatan akun.



- Pada portal SITEMAN masih terkendala kolom nomor

sertifikat yang belum dimunculkan sehingga ketika disinkronkan dengan SIASN tidak bisa menambah nilai. Telah dikomunikasikan untuk penyempurnaannya.

b) Input melalui rekonsiliasi yang di buka melalui portal SIASN dengan meminta data diklat dan kursus yang dimiliki oleh tiap ASN untuk tahun 2023 dan 2024.

- menyebarluaskan informasi diklat/kursus/seminar yang diadakan secara gratis dan diakui jp nya untuk diikuti ASN melalui media yang dimiliki oleh BKPSDM.

3. KINERJA bisa ditingkatkan dengan 2 cara yaitu melalui ;

a) Input mandiri riwayat SKP 2024 melalui portal MyASN / SITEMAN masing-masing ASN yang telah terintegrasi dengan SIASN.

- Pada portal MyASN masih banyak ASN yang belum mengupdate data khususnya PPPK karena belum memiliki akun. Telah dikomunikasikan untuk pembuatan akun.

b) Input melalui rekonsiliasi yang di buka melalui portal SIASN dengan meminta data SKP 2024 yang dibuat tiap ASN untuk tahun 2024.

- Pada rekonsiliasi nilai SKP 2024 / Kinerja naik (berhasil direkon 7.315 PNS dan 2328 PPPK = 9.643 ASN data SKP 2024)
- Banyak ASN yang purna dan meninggal dan purna tahun 2024 yang tidak membuat SKP Tahun 2024.

4. DISIPLIN bisa ditingkatkan melalui portal INDIS yang terintegrasi dengan IPASN

26.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	127,38	Program Kepegawaian Daerah	3.305.834.950	2.486.354.510	75,21	79,58	47,80
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	828.005.528	803.215.781	97,01		

27. Indeks Inovasi

27.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah

Capaian Indeks Inovasi tahun 2024 adalah sebesar 55,6 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 65, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 85,54% (termasuk dalam kategori Baik).

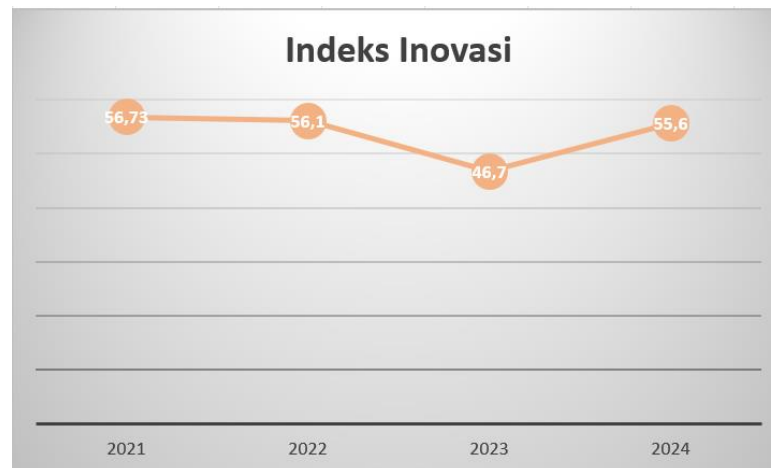
Tabel 3.37 Target dan Capaian Indeks Inovasi Tahun 2024



27.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Indeks Inovasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 3.38 Indeks Inovasi Tahun 2021 - 2024 di Kabupaten Tuban



Berdasarkan SE Kemendagri Nomor 002.6/3363/SJ Tahun 2021, mulai tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran indeks inovasi. Walaupun tidak memenuhi target tahun ini dibandingkan dengan Nilai Indeks Inovasi tahun 2023, Indeks Inovasi tahun 2024 Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebanyak 8,9 poin. Hal ini dikarenakan Perangkat Daerah mulai responsif dalam proses melaporkan inovasi daerah, masih rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah Kabupaten Tuban, kebanyakan disebabkan oleh masih kurangnya kelengkapan data dukung indikator inovasi, Perangkat daerah belum memiliki standar inovasi yang jelas baik dalam rancang bangun, pelaksanaan, maupun evaluasi inovasi yang dilaksanakan. Untuk itu di perlukan komitmen Kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam mencukupi kelengkapan indikator inovasi sesuai dengan juknis dari kemendagri agar dapat menaikkan nilai indeks inovasi.

27.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan capaian Indeks Inovasi Tahun 2024 (55,6) dengan target akhir RPJMD (70,00), maka persentase capaiannya mencapai 79,43. Diperlukan usaha dan kerja keras lebih agar target akhir RPJMD indeks inovasi Kabupaten Tuban bisa tercapai.

27.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Menurunnya capaian Indeks Inovasi dikarenakan beberapa faktor, antara lain :

- a. Perangkat Daerah masih kurang responsif dalam proses melaporkan inovasi daerah.
- b. Masih rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah Kabupaten Tuban

- c. Masih kurangnya kelengkapan data dukung indikator inovasi
- d. Perangkat daerah belum memiliki standar inovasi yang jelas baik dalam rancang bangun, pelaksanaan, maupun evaluasi inovasi yang dilaksanakan, padahal sudah dilakukan sosialisasi dan penyampaian petunjuk teknis yang jelas.

Untuk itu diperlukan komitmen Kepala daerah dan semua Perangkat Daerah dalam mencukupi indikator inovasi sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendagri, beberapa upaya antara lain :

1. Penguatan regulasi yang mewajibkan setiap perangkat daerah menciptakan, menerapkan dan melaporkan inovasinya serta memberikan reward dan punishment terhadap keberhasilan inovasi. Selain itu juga mendorong penciptaan dan penerapan inovasi bagi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
2. Melakukan pengukuran indeks inovasi perangkat daerah melalui Kompetisi inovasi **TUBERNOVA AWARD** (Tuban Berinovasi Award) sebagai wadah penyaluran dan pelaporan praktek baik di lingkungan perangkat daerah maupun masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi dan Coaching atau pendampingan kepada setiap pelaksana inovasi untuk mengoptimalkan skor kematangan indeks inovasi sebagai langkah awal menyiapkan penilaian Indeks Inovasi Daerah



28. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi

28.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tuban Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2023, Tahun 2024 nilai capaiannya sebesar 4,45 sedangkan target kinerja tahun 2024 adalah sebesar 3,88 persentase capaian adalah sebesar 114,65 (Istimewa).

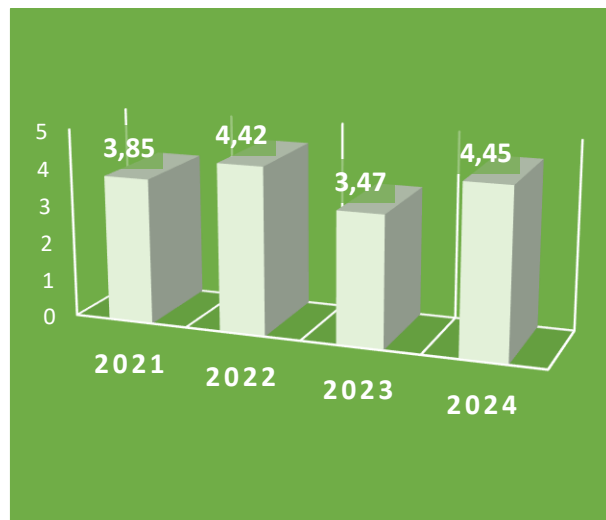
Grafik 3.39. Grafik Target dan Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024



28.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan capaian Indeks Pelayanan Publik selama beberapa tahun terakhir, capaian IPP sangat fluktuatif. Tahun 2022 capaian Indeks Pelayanan Publik mengalami kenaikan sebesar 0,84, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 0,95 poin. Namun di tahun 2024 capaian IPP adalah 4,45 tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Grafik 3.40 Capaian Indeks Pelayanan Publik selama beberapa tahun terakhir



28.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (4,07), capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 sudah melebihi target dengan capaian 4,45 (realisasi 109,34%). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian target untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) di tahun 2025 sampai dengan 2026.

28.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar/ Provinsi/ Nasional

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar dan Pemerintah provinsi Jawa Timur, capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tuban masih dibawah nilai IPP Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi dari Kabupaten terdekat yaitu Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan. Akan tetapi dalam penilaian Ombudsman Kabupaten Tuban termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Tabel 3.38 Perbandingan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dibandingkan dengan daerah sekitar dan provinsi

Nama Daerah	Nilai IPP 2024
Pemprov Jawa Timur	4,63
Kabupaten Jombang	4,60
Kabupaten Lamongan	4,37
Kabupaten Bojonegoro	4,21
Kabupaten Tuban	4,45

28.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyebab dari tercapainya target Indeks Pelayanan Publik tahun ini antara lain :

- a. Standar Pelayanan yang telah disusun telah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan memunculkan inovasi pelayanan publik;
- b. Komitmen dan konsistensi para pelaksana & pimpinan terkait penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan dilingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- c. Penyelenggara sepenuhnya merubah Standar Pelayanan apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya.

28.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	114,16	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.872.999.791	2.801.447.807	88,24	26,45
		Program pendaftaran penduduk	3.883.048.904	3.319.800.746		
		Program Pencatatan Sipil	611.337.060	576.631.500		
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	756.391.210	696.610.101		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	51.241.464.842	44.725.894.362		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.302.040.304	1.135.261.437		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	207.319.940	205.488.000		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.249.746.880	2.123.364.390		
		Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1.286.195.360	1.251.683.504		

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tuban telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 14 (empat belas) sasaran yang mencakup 25 (dua puluh lima) indikator sasaran rata-rata capaian kinerjanya 72,73% atau kategori capaian baik.

Adapun uraian berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 14 (empat belas) indikator, 25 (dua puluh lima) sasaran dan 4 (empat) misi dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran dengan nilai > lebih dari 100 sebanyak 15 (lima belas) indikator sasaran, indikator sasaran dengan nilai >75 – 100 sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran, indikator sasaran dengan nilai >55 – 75 sebanyak 1 (satu) indikator sasaran, sedangkan indikator dengan nilai dibawah 2 (dua), serta 7 (indikator) indikator sasaran belum dirilis. Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur dengan 1 indikator yaitu Indek Kualitas Layanan Infrastruktur dengan capaian kinerja sebesar 105,44% atau kategori memuaskan.
2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan 1 indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan capaian kinerja sebesar 109,57 % atau memuaskan.
3. Pencapaian sasaran 3 Berkurangnya resiko bencana dengan 1 indikator yaitu Indeks Resiko Bencana belum dirilis.
4. Pencapaian sasaran 4 Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis dengan 1 indikator yaitu Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup dengan capaian sebesar 100,09 % atau kategori memuaskan.
5. Pencapaian sasaran 5 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan 3 (tiga) indikator yaitu PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan, PDRB Sektor Industri Pengolahan, PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan rata-rata capaian sebesar 84,49% atau kategori sangat baik.

6. Pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan 3 (tiga) indikator yaitu Tingkat Inflasi Daerah, Indeks Desa Membangun (IDM), dan PDRB Per kapita rata-rata capaian sebesar 109,85% atau memuaskan.
7. Pencapaian sasaran 7 Meningkatnya nilai investasi daerah dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase peningkatan nilai investasi capaiannya sebesar -2800 % atau sangat rendah.
8. Pencapaian sasaran 8 Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pendidikan belum rilis dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian sebesar 112,57% atau kategori memuaskan.
9. Pencapaian sasaran 9 Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kesehatan dengan capaian sebesar 104,32 % atau kategori memuaskan.
10. Pencapaian sasaran 10 Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Ketahanan pangan dengan capaian sebesar 96,46 atau kategori Sangat Baik.
11. Pencapaian sasaran 11 Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan 1 (satu) indikator yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG) belum dirilis untuk tahun 2024.
12. Pencapaian sasaran 12 Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan 5 (lima) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kapasitas Fiskal, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Pada 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) capaian kinerjanya belum dirilis, sedangkan rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator lainnya sebesar 110,86% atau kategori memuaskan.

13. Pencapaian sasaran 13 Birokrasi yang kapabel dengan 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kearsipan Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Indeks Inovasi dengan rata-rata capaian sebesar 116,47 atau kategori memuaskan.
14. Pencapaian sasaran 14 Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dengan 1 (satu) indikator Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi) capaian kinerjanya sebesar 114,69% atau kategori memuaskan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 14 (empat belas) sasaran yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras demi terwujudnya “Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”.

Tuban, Maret 2025

An. Bupati Tuban,
Sekretaris Daerah



Drs. H. BUDI WIYANA, MSi
Pembina Utama Madya
NIP.196710051992021004



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE
Jabatan : BUPATI TUBAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tuban, 23 September 2024

BUPATI TUBAN,


ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

REVISI LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	1. Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	81,5
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,03322
3	Berkurangnya resiko bencana	3. Indeks Resiko Bencana	127
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,03
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,65
		6. PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,73
		7. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,81
6	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8. Tingkat Inflasi Daerah	1-2
		9. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8001
		10. PDRB Per Kapita	57.180 .000
7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11. Persentase Peningkatan Nilai Investasi	3,5
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12. Indeks Pendidikan	0,61
		13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14. Indeks Kesehatan	0,81
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15. Indeks Ketahanan Pangan	89
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,98
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,2503
		18. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,5
		19. Indeks Kapasitas Fiskal	1,7
		20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	80
13	Birokrasi yang kapabel	21. Indeks Kearsipan Daerah	88,21
		22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE)	3,95
		23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	80,12
		24. Indeks Inovasi	65

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima	25. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	3,88

No	Program	Pagu	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.536.214.469.743	PAPBD/DAK/BLUD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	270.983.041.191	PAPBD/DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	227.454.000	PAPBD
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	316.430.000	PAPBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	32.966.670	PAPBD
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	156.495.725.512	PAPBD/DBHCHT,PAJAK ROKOK/DAK
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.464.614.630	PAPBD/DAK
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	471.175.730	PAPBD/DAK
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.593.163.680	PAPBD/DAK
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	133.781.543.300	PAPBD/DAK
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.786.248.600	PAPBD/DAK
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	100.000.000	PAPBD/DAK
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.880.558.600	PAPBD/DAK
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	81.450.000.000	PAPBD
15	Program Penataan Bangunan Gedung	8.357.187.450	PAPBD
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	54.523.572.402	PAPBD
17	Program Penyelenggaraan Jalan	352.996.522.310	PAPBD/DAK
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.000.000.000	PAPBD
19	Program Pengembangan Perumahan	62.500.000	
20	Program Kawasan Permukiman	4.002.500.000	PAPBD/SILPA DAK
21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	100.134.972.424	PAPBD

No	Program	Pagu	Keterangan
22	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.731.298.425	PAPBD
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.554.741.060	PAPBD
24	Program Penanggulangan Bencana	7.394.341.338	PAPBD
25	Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170	PAPBD
26	Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717	PAPBD
27	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11.770.445.390	PAPBD/DBHCHT
28	Program Penanganan Bencana	788.878.550	PAPBD
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546	PAPBD
30	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	PAPBD
31	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	PAPBD/DBHCHT
32	Program Hubungan Industrial	472.700.000	PAPBD
33	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	490.968.430	PAPBD
34	Program Perlindungan Perempuan	131.451.760	PAPBD
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	65.502.200	PAPBD
36	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	514.610.800	PAPBD
37	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	115.612.630	PAPBD
38	Program Perlindungan Khusus Anak	150.964.900	PAPBD
39	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6.920.579.510	PAPBD
40	Program Penanganan Kerawanan Pangan	164.948.200	PAPBD
41	Program Pengawasan Keamanan Pangan	129.008.670	PAPBD
42	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.052.499.370	PAPBD
43	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.182.891.446	PAPBD
44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	35.000.000	PAPBD
45	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	227.900.720	PAPBD
46	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.186.310.400	PAPBD
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	67.177.580	PAPBD
48	Program Pengelolaan Persampahan	18.967.296.000	PAPBD

No	Program	Pagu	Keterangan
49	Program Pendaftaran Penduduk	3.883.048.904	PAPBD
50	Program Pencatatan Sipil	611.337.060	PAPBD
51	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	756.391.210	PAPBD
52	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	54.999.750	PAPBD
53	Program Penataan Desa	98.086.000	PAPBD
54	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	118.731.600	PAPBD
55	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083	PAPBD
56	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220	PAPBD
57	Program Pengendalian Penduduk	519.700.500	PAPBD/DAK
58	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	7.170.025.000	PAPBD/DAK
59	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	6.258.309.000	PAPBD/DAK
60	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	133.857.190.580	PAPBD
61	Program Pengelolaan Pelayaran	49.999.980	PAPBD
62	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.872.999.791	PAPBD
63	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.796.611.234	PAPBD
64	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800	PAPBD
65	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	290.297.880	PAPBD DAN DAK NON FISIK
66	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	209.199.920	PAPBD
67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	592.000.000	PAPBD DAN DAK NON FISIK
68	Program Pengembangan Umkm	928.897.690	PAPBD
69	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352.350.000	PAPBD
70	Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	PAPBD
71	Program Pelayanan Penanaman Modal	506.199.600	PAPBD
72	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458.147.000	PAPBD
73	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254.294.400	PAPBD
74	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.444.371.796	PAPBD
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.042.878.490	PAPBD
76	Program Pengembangan Kapasitas Keparamukaan	1.300.000.000	PAPBD
77	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	370.257.150	PAPBD

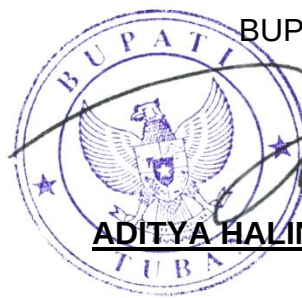
No	Program	Pagu	Keterangan
78	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	141.349.970	PAPBD
79	Program Pengembangan Kebudayaan	1.871.139.550	PAPBD
80	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367.692.000	PAPBD
81	Program Pembinaan Sejarah	126.384.000	PAPBD
82	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	PAPBD
83	Program Pengelolaan Permuseuman	1.301.610.550	PAPBD/DAK
84	Program Pembinaan Perpustakaan	1.980.498.510	PAPBD
85	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	46.000.000	PAPBD
86	Program Pengelolaan Arsip	634.290.920	PAPBD
87	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	134.050.710	PAPBD
88	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	PAPBD/DAK
89	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	PAPBD/DAK
90	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	114.223.980	PAPBD
91	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	PAPBD/DAK
92	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.199.800.000	PAPBD
93	Program Pemasaran Pariwisata	425.000.000	PAPBD
94	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	225.000.000	PAPBD
95	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.869.911.220	PAPBD
96	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	PAPBD/DAK/DBHCHT
97	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	PAPBD/DAK/DBHCHT
98	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	PAPBD/DAK
99	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	PAPBD
100	Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	PAPBD
101	Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	PAPBD/DAK
102	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940	PAPBD
103	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	479.771.170	PAPBD
104	Program Pengembangan Ekspor	558.669.830	PAPBD
105	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	521.540.000	PAPBD

No	Program	Pagu	Keterangan
106	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790	PAPBD
107	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	PAPBD
108	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	PAPBD
109	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	166.554.800	PAPBD
110	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	43.945.143.943	PAPBD
111	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.505.258.830	PAPBD/DBHCHT
112	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	51.241.464.842	PAPBD
113	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.645.619.704	PAPBD
114	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.535.784.120	PAPBD
115	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.403.659.420	PAPBD
116	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.462.220.291	PAPBD
117	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.704.200.820	PAPBD
118	Program Kepegawaian Daerah	3.305.834.950	PAPBD
119	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	828.005.528	PAPBD
120	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.136.219.080	PAPBD
121	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.601.586.000	PAPBD
122	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.886.199.157	PAPBD
123	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.302.040.304	PAPBD
124	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.650.992.244	PAPBD
125	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.286.195.360	PAPBD
126	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	207.319.940	PAPBD
127	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.249.746.880	PAPBD
128	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.696.868.400	PAPBD
129	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	52.531.200.900	PAPBD

No	Program	Pagu	Keterangan
130	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	278.809.200	PAPBD
131	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	432.975.740	PAPBD
	Total	3.255.567.924.430	

Tuban, 23 September 2024

BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE